



Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Laporan Panitia Kerja

Open Government-Parliament (OGP)
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI
BKSAP DPR RI
Tahun 2025



BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2025

KATA PENGANTAR KETUA BKSAP DPR RI

Assalamualaikum Wr., Wb.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, BKSAP DPR RI kembali menggalakkan keterlibatan parlemen dalam semangat keterbukaan melalui OGP.

Sejak 2018 silam, DPR telah terlibat dalam agenda internasional keterbukaan di OGP melalui OPI. Tercatat sudah dua kali rencana aksi terpisah dari pemerintah disusun DPR RI yakni pada 2018-2020 dan 2020-2022. Perjalanan OPI cukup memberi warna dan perubahan signifikan di internal. Di sisi lain, DPR RI meneguhkan perannya sebagai yang terdepan dalam pembaharu nilai-nilai demokrasi di Asia. OPI merupakan inisiatif parlemen terbuka yang bisa dibilang kali pertama di Asia, mengingat tidak banyak parlemen yang mengajukan rencana aksi keterbukaan parlemen secara terpisah.

Berbekal peran internasional yang kuat itu, BKSAP DPR RI sebagai penjaga gawang diplomasi parlemen tidak menyia-nyiakan kesempatan manakala diminta untuk berbagi pengalaman dan terlibat dalam agenda OGP *Asia and the Pacific Regional Meeting* di Filipina, Februari 2025. Pertemuan tersebut membawa perspektif segar dan semangat terbarukan untuk mendorong keberlanjutan agenda OPI sekaligus menunjukkan DPR sebagai lembaga perwakilan tak pupus dalam semangat memperbaiki dirinya demi kepentingan rakyat banyak. Upaya ini sejalan dengan tren global yang menuntut pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

Implementasi OGP di Indonesia mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itulah BKSAP DPR RI membentuk sebuah Panja yang fokus pada isu-isu keterbukaan baik di pemerintah maupun parlemen. Bekerjasama dengan masyarakat sipil dan mitra internasional, seperti WFD, kami bahu membahu menyalakan kembali upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai OPI.

BKSAP mengharapkan Panja dapat bekerja semaksimal mungkin dalam rentang waktu enam bulan. *Alhamdulillah*, dalam kurun waktu dimaksud, Panja dapat bergerak strategis menghidupkan agenda-agenda keterbukaan lebih jauh.

BKSAP akan mendiskusikan langkah-langkah lanjutan menindaklanjuti ragam rekomendasi yang dihasilkan Panja dalam buku ini. Saya berharap, seluruh rekomendasi Panja akan dapat dilaksanakan baik oleh BKSAP, alat kelengkapan DPR lainnya, hingga DPR secara kelembagaan. Secara mendalam saya juga mendesak agar pemerintah memperhatikan dengan seksama rekomendasi-rekomendasi dan temuan yang muncul selama masa tugas Panja OG-P BKSAP DPR RI ini.

Saya mengapresiasi Ketua dan jajaran anggota Panja atas kontribusi dan pemikiran berharga sepanjang masa tugas yang singkat ini. Panja telah meletakkan fondasi cukup kuat untuk tugas lanjutan penguatan kelembagaan baik DPR maupun sistem pendukung dalam agenda-agenda keterbukaan di OGP.

Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan tak kenal lelah tim teknis Panja yang terdiri dari Sekretariat KSR BKSAP DPR RI dan Tenaga Ahli BKSAP DPR RI. Peran sinergi antara tim teknis dengan Panja ini memungkinkan BKSAP berkiprah lebih lanjut ke depan dalam mendorong implementasi OPI.

Akhir kata, di tengah gejolak dan tuntutan publik yang menghiasi dinamika perpolitikan kita saat ini, rekomendasi ini menjadi refleksi diri dan peluang berbenah diri. Kita harus selalu mengingat, dalam setiap masa sulit akan selalu ada kemudahan. Dalam setiap gelap, akan selalu ada terang. Dan, melalui rekomendasi ini, DPR dapat memperkuat diri dalam aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, dan kelembagaan yang mampu memperkuat ikatan batin dengan masyarakat yang diwakilinya.

Wassalamualaikum Wr., Wb.

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng

Ketua BKSAP DPR RI

KATA PENGANTAR KETUA PANJA OGP

Assalamualaikum., Wr., Wb.

Belakangan ini kita dihadapkan pada situasi pelik dinamika masyarakat sebagai imbas dari imaji negatif DPR dalam menangkap sensitivitas publik akan kesenjangan ekonomi. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi lembaga legislatif. Adalah sebuah keharusan bagi DPR untuk dapat *sensible* dan dekat dengan akar rumput, menangkap keresahan dan kegelisahan yang ada. Di lain sisi, adalah tantangan pula bagi DPR secara kelembagaan untuk memotret realita, perasaan, komunikasi, dan melibatkan publik dalam setiap kerja-kerja legislatif.

Maka ketika saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam area kerja Panja OGP, peran tersebut tak dapat saya sia-siakan. Melalui BKSAP dan Panja, DPR dapat menggali pengetahuan global untuk memperkuat kelembagaan DPR agar lebih baik dalam melayani masyarakat. Ini tak lain karena keinginan untuk dapat memperkuat mekanisme aspirasi dan upaya melibatkan publik agar dapat lebih bermakna di DPR.

Oleh karenanya, Panja pun juga memiliki fokus kuat dalam isu partisipasi publik bermakna, utamanya dalam proses legislasi. Dalam masa tugas enam bulan ini Panja telah mulai menghidupkan kembali semangat keterbukaan parlemen dengan fokus integrasi rencana aksi OGP secara nasional, melalui rencana sistem pendukung DPR dalam menyusun panduan partisipasi publik bermakna. Rencana ini kami ajukan menjadi bagian rencana aksi nasional dengan harapan ke depan, DPR dapat lebih baik dalam menjadi penyambung lidah rakyat dalam proses legislasi.

Implementasi OGP menjadi semakin strategis mengingat akses Indonesia ke OECD mensyaratkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik menjadi nilai-nilai yang diyakini bersama untuk kemajuan pembangunan sebuah bangsa.

Sepanjang masa tugas Panja, kami melakukan identifikasi dan juga advokasi terhadap peran dan inovasi pemerintah daerah dalam kaitan dan peran mereka di OGP Local. OGP sebagai sebuah organisasi internasional, memiliki komposisi unik karena sistem keanggotaannya terdiri dari negara, pemerintah sub-nasional/daerah, dan masyarakat sipil. Oleh karena pelayanan dan kebutuhan publik tidak hanya terpusat di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah, maka identifikasi dan advokasi di level daerah menjadi tak terhindarkan. Sejauh ini, Indonesia memiliki delapan daerah yang menjadi anggota OGP Local, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Madiun, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Banggai.

Secara keseluruhan, Panja mendapatkan kesan implementasi OGP di tingkat daerah menunjukkan variasi yang signifikan, mulai dari adanya keinginan kuat untuk mendalami aspek OGP Local, inovasi yang akan (belum) dimulai, rencana yang telah berlalu dan akan dihidupkan kembali, dan lainnya. Tetapi apa yang Panja potret belum dapat mewakili perspektif utuh dari eksistensi OGP *Local* mengingat banyaknya provinsi, kabupaten dan kota yang masih belum kami jangkau.

Di sisi lain, agenda-agenda kelembagaan terkait keterbukaan parlemen yang kami rencanakan untuk menjadi bagian terintegrasi dalam rencana aksi OGP nasional, masih baru dalam tahap permulaan. Sekretariat OGI masih dalam proses kokreasi dengan DPR dan masyarakat sipil. Sementara agenda-agenda besar menanti seperti upaya penguatan kapasitas melalui jejaring internasional dan pertukaran pengetahuan di *Open Parliament Day* dan OGP *Summit*, maupun forum-forum internasional lainnya. Untuk itu, Panja menekankan pentingnya keberlanjutan peran dan tugas Panja ke depan, dalam mekanisme yang dipandang sesuai oleh BKSAP maupun DPR RI.

Buku rekomendasi ini merangkum catatan kiprah yang dilakukan Panja dalam upaya baik secara kelembagaan, peneguhan komitmen, hingga advokasi OGP *Local* untuk terus mendorong program-program terkait transparansi, akuntabilitas hingga partisipasi publik.

Saya mengapresiasi Pimpinan BKSAP dan Anggota Panja atas peran aktifnya dalam bertugas. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada tim teknis (Sekretariat dan Tenaga Ahli BKSAP DPR RI) atas dukungannya dalam kerja-kerja Panja. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dan niatkan ini dapat membantu lembaga legislatif menjadi lembaga perwakilan yang sebetul-betul dekat dengan rakyatnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr., Wb.

H. Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.

Ketua Panja OGP / Wakil Ketua BKSAP DPR RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA BKSAP DPR RI.....	1
KATA PENGANTAR KETUA PANJA OGP.....	3
SINGKATAN DAN AKRONIM.....	7
IKHTISAR.....	9
Latar Belakang	9
Dasar hukum	9
Tujuan	10
Program Kerja	10
Rekomendasi	13
Tentang OGP	15
Area Kerja (Kebijakan)	16
Proses di OGP	21
OGP di Indonesia	23
Strategi OGP 2023-2028	23
Inisiatif Open Parliament	25
Pendekatan OGP untuk Open Parliament	26
Open Parliament Indonesia (OPI)	29
OGP Local	30
II – AKTIVITAS DAN TEMUAN PANJA OG-P.....	31
Aktivitas Panja OG-P	31
FGD Tangerang: Mendorong Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Melalui Parlemen Terbuka di Indonesia.....	31
Diskusi penyusunan rencana tindak lanjut.....	33

Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat	37
Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi DIY	40
Jejaring Internasional: Pertemuan dengan OGP	45
Integrasi Komitmen DPR RI ke dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia.....	46
Kunjungan Kerja ke Ibukota Nusantara	55
Sinergi dengan OGP Lokal: Provinsi NTB	50
Temuan Panja	59
III – PENUTUP DAN REKOMENDASI	64
REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	64
REKOMENDASI UNTUK DPR RI	66

SINGKATAN DAN AKRONIM

AIPA	: <i>ASEAN Inter-Parliamentary Assembly</i>
APA	: <i>Asian Parliamentary Assembly</i>
BKSAP DPR RI	: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPDRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FPRB	: Forum Pengurangan Risiko Bencana
GOPAC	: <i>Global Organization of Parliamentarians against Corruption</i>
IEP	: <i>International Expert Panel</i>
IJRS	: <i>Indonesia Judicial Research Society</i>
IKN	: Ibu Kota Nusantara
INFID	: <i>International NGO Forum for Indonesian Development</i>
IPC	: <i>Indonesian Parliamentary Center</i>
IPU	: <i>Inter-Parliamentary Union</i>
IRM	: <i>Independent Reporting Mechanism</i>
Jabar	: Jawa Barat
Juknis	: Petunjuk Teknis
KAKI	: Koalisi Anti Korupsi Indonesia
Kominfo	: Komunikasi dan Informasi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

MSF	: <i>Multi-Stakeholders Forum</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OGI	: <i>Open Government Indonesia</i>
OG-P	: <i>Open Government – Parliament</i>
OGP	: <i>Open Government Partnership</i>
OIKN	: Otorita IKN
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
Panja	: Panitia Kerja
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Perludem	: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Pokir	: Pokok-pokok pikiran
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PUIC	: <i>Parliamentary Union of OIC Member States</i>
PWYP	: <i>Publish What You Pay</i>
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAN	: Rencana Aksi Nasional
Renkon	: Rencana Kontigensi
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEAPAC	: <i>South-East Asia Parliamentarians against Corruption</i>
TII	: <i>Transparency International Indonesia</i>
WFD	: <i>Westminster Foundation for Democracy</i>

IKHTISAR

Latar Belakang

Sejak 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) aktif dalam inisiatif OPI sebagai bagian dari kemitraan global OGP. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri OGP, sebuah organisasi internasional dengan misi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan akuntabel.

Seiring berakhirnya RAN OGI pada 2024 dan belum diperbaruinya RAN OPI sejak 2022, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun strategi baru yang mengintegrasikan kedua rencana aksi tersebut. Komunitas masyarakat sipil Indonesia juga telah menyerukan integrasi RAN OGI dan OPI dalam forum regional OGP Asia Pasifik.

Merespon meningkatnya isu keterbukaan parlemen di level global, OGP memperbarui panduan *open parliament* mereka melalui [Memorandum on Parliamentary Engagement](#).¹ Pembaruan instrumen OGP tersebut menjadi salah satu pematik bagi BKSAP DPR RI untuk mereformulasi langkah dan meningkatkan peran diplomasi parlemen dalam mendorong gerakan keterbukaan di lembaga legislatif. Upaya ini semata-mata dilakukan agar parlemen tetap dapat berkontribusi dalam ragam area kerja OGP sejalan dengan kehendak dan tuntutan publik agar lembaga legislatif semakin transparan, terbuka, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai tindaklanjut BKSAP DPR RI—sesuai kewenangan yang diatur dalam Tatib DPR RI—membentuk Panja OG-P.

Dasar hukum

1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 (Perubahan Ketiga).
3. Pasal 4 dan Pasal 174 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.
4. Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI Tanggal 3 Maret 2025.

¹ <https://www.opengovpartnership.org/documents/memorandum-on-parliamentary-engagement/>

Tujuan

Dalam pembentukannya, BKSAP berharap Panja mampu mengkaji secara mendalam potensi integrasi antara RAN OPI dan RAN OGI, yang selama ini berjalan secara terpisah. Integrasi bertujuan menciptakan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas di berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain itu, Panja OG-P juga dirancang untuk memperkuat peran parlemen dalam kebijakan keterbukaan, termasuk mendalami agenda keterbukaan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks diplomasi, Panja menjadi instrumen penting DPR RI untuk berperan aktif dalam isu-isu keterbukaan dan tata kelola yang baik di forum-forum internasional seperti OGP dan *Open Parliament Day*, IPU, PUIC, GOPAC, SEAPAC, hingga AIPA. Dengan demikian, Panja OG-P tidak hanya berfungsi sebagai wadah kajian, tetapi juga sebagai penggerak diplomasi parlemen Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai pemerintahan terbuka di tingkat global.

Sebagai modal peran aktif internasional itu, penting pula bagi DPR RI untuk berbenah diri memperkuat tata kelola kelembagaan agar menjadi lembaga perwakilan yang aspiratif, terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam konteks ini, mendengar

- Mengkaji potensi integrasi RAN OPI dan OGI.
- Mengadvokasi peran parlemen dalam mendukung kebijakan terkait OGP.
- Mendalami agenda keterbukaan di berbagai level pemerintahan.
- Memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil.

perspektif eksternal termasuk dari kalangan masyarakat sipil mengenai penguatan kelembagaan DPR RI dalam aspek OPI dan OGP adalah fundamental. Panja didesain sebagai mekanisme mendengar tersebut, sebagai upaya penguatan kemitraan dan jejaring komunikasi dengan masyarakat sipil untuk kerja-kerja legislatif yang lebih baik.

Program Kerja

Dalam kurun waktu enam bulan, Panja berfokus pada tiga area utama kegiatan yakni:

Pengkajian dan rekomendasi tertulis

Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, Panja berharap semaksimal mungkin untuk melibatkan dan mendapatkan gambaran, panduan, serta ekspektasi dari kalangan

non-parlemen dalam memperkuat mekanisme OPI ke depan. Oleh karenanya, diskusi kelompok terpumpun (FGD) menjadi salah satu metode yang dilakukan untuk menggali dan mendapatkan kajian-kajian memadai terkait harapan publik akan OPI. Adapun aktivitas Panja terkait hal ini adalah sebagai berikut:

1. FGD *Open Parliament Briefing for BKSAP DPR RI: Fostering Transparency, Participation, and Accountability through Open Parliament in Indonesia* pada tanggal 19 Maret 2025.
2. Rapat Tindak Lanjut Panja dan Koordinasi Tim Teknis Panja dengan OGP, OGI, dan perwakilan masyarakat sipil pada tanggal 17 April 2025.
3. Penyusunan Lembar Fakta OGP – OPI.
4. Penyusunan Laporan Rekomendasi Panja OG-P BKSAP DPR RI.

Misi Lapangan

Misi lapangan menjadi bagian penting kerja Panja sebagai mekanisme ganda yakni pencarian data dan informasi maupun advokasi isu-isu keterbukaan. Dalam konteks ini, Panja mengambil langkah untuk mendalami agenda-agenda keterbukaan di level lokal, dengan harapan dapat menemukan praktik baik terkait OGP di daerah, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan mendorong pelaksanaan rencana aksi keterbukaan secara lokal sejalan dengan adanya OGP Local.

Dalam setiap misi lapangan, Panja menemukan sejumlah catatan baik yang perlu diapresiasi maupun yang harus diperkuat atau ditindaklanjuti pemerintah untuk peningkatan performa lokal dan nasional dalam isu keterbukaan. Adapun Panja melakukan pengumpulan data dan informasi di daerah-daerah dan dengan sejumlah catatan yang mengemuka sebagai berikut:

1. Provinsi Jabar pada 28-30 April 2025

Daerah yang baru saja bergabung sebagai OGP Local pada 2024. Sejumlah inisiatif keterbukaan telah dimiliki. Namun demikian, Panja mencatat Provinsi Jabar belum menyusun rencana aksi keterbukaan meskipun telah banyak inisiatif terkait aspek-aspek OGP dilakukan. Hal ini terkonfirmasi juga dari belum tersedianya dokumen rencana aksi keterbukaan di web OGP Local.² Panja juga memperoleh aspirasi agar BKSAP dapat memperkuat wawasan dan perspektif anggota DPRD Jabar terkait OGP dan OGP Local.

² <https://www.opengovpartnership.org/members/west-java-indonesia/>

2. Provinsi DIY pada 30 April – 2 Mei 2025

Daerah yang juga baru bergabung sebagai OGP Local pada 2024. DIY telah memiliki rencana aksi keterbukaan untuk periode [2024-2027](#).³ Rencana aksi berfokus pada integrasi data penanganan kemiskinan berbasis teknologi informasi dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui aplikasi pelaporan kebencanaan di satuan pendidikan. Panja mencatat DIY telah membangun infrastruktur digital yang menjangkau seluruh kelurahan, menerapkan sistem evaluasi kinerja aparatur berbasis *reward* dan *punishment*, serta mengembangkan portal anggaran yang dapat diakses publik secara *real-time*.

3. Provinsi NTB pada 8-10 Juli 2025

NTB bergabung sebagai OGP Local sejak 2020 silam dengan rencana aksi keterbukaan daerah dimulai untuk periode [2021-2023](#).⁴ Panja menemukan belum adanya keberlanjutan rencana aksi keterbukaan daerah untuk periode berikutnya. Meski demikian, Gubernur NTB menegaskan komitmennya untuk melanjutkan keterlibatan NTB di OGP Local dan memulai proses ko-kreasi untuk penyusunan rencana aksi berikutnya.

4. IKN pada 15-18 Juli 2025

Wilayah IKN dalam hal ini daerah yang menjadi kelola dari Otorita IKN belum menjadi bagian dari OGP Local. Pemilihan IKN sebagai bagian misi lapangan merupakan inisiatif untuk mendalami proyeksi dan rencana masa depan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan IKN dan digitalisasi yang digadang-gadang seiring telah terbitnya [Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara](#).⁵ Panja menemukan OIKN berupaya maksimal menerapkan mekanisme partisipasi dalam pembangunan sejak awal pembahasan dengan masyarakat sekitar IKN. Namun, mekanisme tersebut belum terbakukan secara pasti. Panja juga mencatat adanya keinginan OIKN untuk terlibat lebih dalam dalam isu-isu keterbukaan di OGP melalui OGP Local.

³ <https://www.opengovpartnership.org/documents/action-plan-yogyakarta-indonesia-2024-2027/>

⁴ <https://www.opengovpartnership.org/documents/action-plan-west-nusa-tenggara-indonesia-2021-2023/>

⁵ https://www.ikn.go.id/storage/thd/blueprint/cetak_biru_kota_cerdas_nusantara.pdf

Diplomasi Parlemen

Diplomasi parlemen juga menjadi fokus penting, di mana Panja OGP memanfaatkan forum-forum internasional untuk mempromosikan komitmen Indonesia terhadap pemerintahan terbuka. Anggota Panja secara tidak langsung berkontribusi dan menyuarakan isu-isu OGP sebagai bagian dari kerja-kerja diplomasi parlemen. Adapun beberapa agenda internasional yang menjadi sorotan penting sebagai berikut:

1. *OGP Asia and the Pacific Regional Meeting*, Manila, Filipina 5-7 Februari 2025.

BKSAP menghadiri agenda OGP Asia and the Pacific Regional Meeting untuk menyampaikan pandangan DPR terkait open government serta menjalin kerja sama lebih erat dan menguatkan jaringan DPR dengan insan OGP. Melalui agenda tersebut, BKSAP kemudian mengawali komitmen untuk kembali memperkuat OPI melalui pembentukan Panja OG-P.

2. *The 19th Session of the PUIC Conference*, Jakarta, Indonesia, 12-15 Mei 2025.

Sebagai bagian dari komitmen diplomasi parlemen dan penguatan tata kelola pemerintahan terbuka, Panitia Kerja Open Government–Parliament (Panja OGP) DPR RI turut mendukung penyelenggaraan Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Konferensi ini mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, sejalan dengan semangat Panja OGP dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi ketahanan demokrasi.

3. *SEAPAC Annual General Meeting (AGM) & Bulaksumur Roundtable Forum (BRF)*, Yogyakarta, Indonesia, 20-21 Agustus 2025.

AGM dan Roundtable Forum/Discussion merupakan forum strategis untuk menetapkan arah kebijakan SEAPAC. Dalam agenda tersebut, Anggota Panja yang juga anggota SEAPAC dari BKSAP menyuarakan pentingnya demokrasi lingkungan sebagai bagian dari agenda iklim yang berkeadilan. Delegasi berkontribusi dalam menyusun hasil keluaran SEAPAC yakni *Call to Actions*, dengan salah satu seruan terkait penyempurnaan legislasi terkait demokrasi lingkungan hidup yakni partisipasi publik bermakna, reformasi dalam akses informasi, hingga perlindungan yang lebih baik bagi aktivis lingkungan.

Rekomendasi

Melalui beragam aktivitas Panja selama enam bulan sekaligus mencermati dinamika situasi terkini, Panja menjabarkan rekomendasi-rekomendasi bagi Pemerintah dan DPR RI agar ke depan Indonesia sebagai negara pendiri OGP dapat memperkuat semangat

transparansi, keterbukaan, partisipasi, inklusivitas, hingga akuntabilitasnya sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip OGP:

Rekomendasi untuk Pemerintah

- 1. Penguatan instrumen hukum dan kelembagaan OGP.**
- 2. Penyelarasan dan penguatan rencana aksi keterbukaan.**
- 3. Penguatan tata kelola digital berbasis prinsip OGP.**
- 4. Asistensi dan monitoring terhadap OGP Lokal.**

Rekomendasi untuk DPR RI

- 1. Penguatan kelembagaan dan komitmen Parlemen Terbuka.**
- 2. Penguatan transparansi dan akses informasi.**
- 3. Pengarusutamaan partisipasi publik bermakna.**
- 4. Diplomasi parlemen proaktif dalam agenda keterbukaan.**
- 5. Keberlanjutan Panja OGP ataupun Panja baru dengan mengusung nilai-nilai OGP.**

I – OGP DAN INISIATIF OPI

Tentang OGP

OGP adalah kemitraan unik melalui kelembagaan internasional yang terbentuk antarpemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola yang transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel.

Indonesia adalah satu dari tujuh negara pendahulu terbentuknya OGP. Bersama Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina, negara-negara tersebut mendeklarasikan OGP dan Indonesia resmi memasuki siklus rencana aksi OGI sejak 2012.⁶

Skema kemitraan OGP relatif unik karena melibatkan keanggotaan tiga pihak, yakni negara (pemerintah pusat), pemerintahan daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Struktur OGP terdiri dari Dewan Pengarah (*Steering Committee*) yang beranggotakan wakil negara dan masyarakat sipil secara seimbang; Dewan Direksi; International Experts Panel; OGP Ambassadors and Envoys; Staff OGP.

Sekretariat OGP berada di Washington, Amerika Serikat. Staff OGP dipimpin oleh CEO Aidan Eyakuze, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif sebuah organisasi masyarakat sipil di Tanzania, Kenya, Uganda.⁷

Jumlah anggota OGP saat ini 75 negara dan 150 pemerintahan daerah dari berbagai belahan dunia mewakili lebih dari dua miliar penduduk. Selain itu, OGP juga terdiri dari ribuan organisasi masyarakat sipil.

Daftar Negara yang bergabung:

Albania, Argentina, Armenia, Australia, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Carbo Verde, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Honduras, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Kyrgyz Republic, Latvia, Liberia, Lithuania, Malawi, Maldives, Malta, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, Netherland, New Zealand, Nigeria, North Macedonia, Norway, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Senegal, Serbia,

⁶ https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Indonesia_Mid-Term_Self-Assessment_2016-2017.pdf

⁷ <https://www.opengovpartnership.org/people/aidan-eyakuze/>

Seychelles, Sierra Leone, Slovak Republic, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Timor-Leste, Tunisia, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Zambia.



Area Kerja (Kebijakan)

Dalam situasi tantangan global yang semakin meningkat, pemerintah dan masyarakat sipil yang reformis bekerjasama membuat tata kelola semakin transparan, inklusif, dan akuntabel dengan memajukan area kebijakan sebagai berikut:

Anti-korupsi dan Integritas (*anti-corruption and integrity*)

Anggota OGP bekerja untuk menangkas pengaruh yang tidak semestinya dalam setiap urusan pemerintahan baik di level nasional maupun lokal, karena jabatan publik tidak semestinya digunakan untuk kepentingan pribadi. Apabila dilakukan, kepercayaan publik akan terkikis dan kemampuan pemerintah melayani kepentingan publik akan terpengaruh.

Sebagai bagian dari strategi 2023-2028, OGP merencanakan fokus pada kebijakan-kebijakan untuk mengatasi *grand corruption* dan kleptokrasi—aliran keuangan gelap dan pencucian uang—dan juga integritas publik. Hal ini mencakup isu spesifik seperti keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial ownership/BO*), kontrak terbuka (*open contracting*), upaya lobi (*lobbying*), pendanaan politik (*political finance*) dan keterbukaan aset.

Hingga saat ini, terdapat setidaknya 855 komitmen berkaitan dengan isu anti-korupsi dan integritas yang didaftarkan oleh negara dan kawasan anggota OGP. Indonesia secara

konsisten mendaftarkan komitmen terkait isu ini sejak 2011 hingga 2022 meliputi seperti lelang elektronik, transparansi data pengadaan, informasi kontrak terbuka (2011, 2018, 2020) dan penguatan akses terbuka data BO dan pelaksanaannya (2020, 2022).

Secara rerata dari 855 komitmen, hanya sekira 49% yang dianggap ambisius, 60% yang tercapai dan 16% memiliki hasil awal yang positif. Namun tren global, pertumbuhan komitmen di area ini menurun dari sekitar 82% (2012) menjadi 48% (2024).⁸

Ruang Sipil (*civic space*)

Keberadaan masyarakat sipil yang bebas dan aktif adalah kunci untuk memastikan institusi publik terbuka, akuntabel dan responsif. Anggota OGP bekerja untuk memajukan dan melindungi kebebasan demokrasi dasar seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, dan juga kebebasan media/pers.

Dalam aspek kebebasan berkumpul, publik dapat secara damai terlibat dalam ekspresi kolektif, menyampaikan pendapat yang berbeda-beda, dan mengangkat isu yang menjadi perhatian publik. Kebebasan berserikat mempengaruhi kemampuan untuk bergerak secara kolektif.

Hingga saat ini ada sedikitnya delapan komitmen berkaitan dengan aspek kebebasan berkumpul. Indonesia memiliki satu komitmen terkait pemajuan ruang sipil dalam upaya keadilan restoratif (2020). Dari komitmen tersebut, tiga dianggap ambisius, hanya dua komitmen selesai, dengan satu hasil awal yang kuat.⁹

Sementara ada 60 komitmen terkait kebebasan berserikat dengan 28% komitmen terdata ambisius, 46% komitmen rampung, dan hanya 3% yang memiliki hasil awal yang kuat. Komitmen Indonesia terkait pemajuan ruang sipil dalam upaya keadilan restoratif (2020) juga masuk dalam bagian isu ini.¹⁰

Pada aspek kebebasan berekspresi dan media, ada sedikitnya 40 komitmen dengan 44% di antaranya tergolong ambisius, sembilan tercapai, dan hanya dua yang memiliki hasil awal kuat. Indonesia dalam isu ini mengajukan komitmen perlindungan hukum untuk isu

⁸ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/anti_corruption_and_integrity/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

⁹ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/freedom_of_assembly/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

¹⁰ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/freedom_of_association/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

lingkungan (2022) dengan fokus pada penelitian mengenai kepastian hukum bagi pejuang lingkungan.¹¹

Iklm dan Lingkungan (*climate and environment*)

Terkait perubahan iklim, praktik-praktik keterbukaan memungkinkan pemerintah dan masyarakat melihat ongkos sebenarnya dari polusi, diskusi dan ko-kreasi (penyusunan bersama) pendekatan alternatif untuk pembangunan nasional sosial-ekonomi, mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim, dan memastikan adanya pengawasan publik memadai atas kebijakan dan pembiayaan lingkungan dan iklim.

Dua aspek komitmen masuk dalam area ini yakni pembiayaan iklim dan transisi energi. Dalam pembiayaan iklim, anggota OGP dapat menggunakan rencana aksinya untuk memasukkan tujuan lingkungan dalam proses perencanaan dan fiskal serta memastikan program terkait iklim baik nasional dan lintasbatas terlaksana dengan baik. Sementara dalam aspek transisi energi upaya memastikan akses yang universal untuk energi yang terjangkau, berkelanjutan dan mudah sangat penting untuk aspek kemakmuran. Oleh karenanya transparansi dan pengawasan dalam sektor energi dapat mendorong transisi energi yang lebih adil, meningkatkan kesehatan manusia, dan mengakhiri korupsi dan otoritarianisme.¹²

Anggota OGP mencatatkan sedikitnya 227 komitmen terkait kedua aspek dimaksud dengan penilaian ambisius untuk 41% komitmen, tercapai 64%, dan hasil awal yang kuat 17%. Indonesia memasukkan komitmen mulai dari Portal Satu Data (2011), keterbukaan lingkungan (2011), pengaduan publik sektor lingkungan dan kehutanan (2016), hingga pengembangan sistem satu data untuk sumber daya alam (2022).¹³

Tata Kelola Digital (*digital governance*)

Beberapa isu seperti otomatisasi pengambilan keputusan dan AI, ruang sipil digital, hingga misinformasi dan disinformasi masuk dalam area kebijakan ini seiring dengan kemunculan teknologi-teknologi baru yang menghadirkan peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk memajukan keterbukaan, akuntabilitas, dan praktik partisipatif. Anggota OGP bekerja untuk mewujudkan kebijakan yang memaksimalkan manfaat

¹¹ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/freedom_of_expression/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

¹² <https://www.opengovpartnership.org/policy-area/energy-transition/>

¹³ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/environment_climate/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

kemajuan dimaksud sembari melindungi dari bahaya seperti misinformasi dan disinformasi hingga penggunaan aplikasi AI yang berbahaya.

Ada sedikitnya 116 komitmen yang disampaikan anggota OGP dan tergolong dalam area kebijakan ini dengan 26% di-antaranya ambisius, 69% tercapai, dan 7% memiliki hasil awal yang kuat. Indonesia memasukkan komitmen pengaturan perlindungan data pribadi, mekanisme penanganan disinformasi pemilihan umum, panduan aksesibilitas digital bagi kaum disabilitas pada 2022.¹⁴

Keterbukaan Fiskal (*fiscal openness*)

Keterbukaan fiskal berkaitan dengan hak untuk tahu dari publik mengenai bagaimana alokasi keuangan negara disusun dan dibelanjakan. Upaya agar publik dapat memberi masukan dan memeriksa dengan teliti anggaran keuangan dapat memastikan perencanaan dan pengeluaran keuangan pemerintah sejalan dengan prioritas publik.

Setidaknya ada 763 komitmen terdaftar dalam area kebijakan ini. Data OGP menunjukkan dari komitmen tersebut, 55% di-antaranya tergolong ambisius, dan negara anggota telah mencapai 64% komitmen terdaftar. Selain itu, 21% teridentifikasi memiliki hasil awal yang kuat. Indonesia mendaftarkan komitmen dalam aspek ini sejak 2011 yang meliputi informasi anggaran nasional, informasi anggaran daerah (2011), transparansi pendapatan minyak, gas, dan pertambangan (2013), partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan (2016), hingga pengelolaan data ekstraktif (2018).¹⁵

Inklusi (*inclusion*)

Inklusivitas fundamental untuk memastikan produk kebijakan berkeadilan, representatif, dan akuntabel dan benar-benar untuk semua. Anggota OGP memajukan inklusivitas melalui inisiatif pemerintahan terbuka, melalui reformasi spesifik gender, melibatkan komunitas pemuda dalam proses kokreasi, atau mengintegrasikan suara minoritas dan kelompok rentan lainnya. Ada sedikitnya 253 komitmen terkait gender dengan 42% ambisius, 52% selesai, dan 15% hasil awal yang kuat. Terkait hal ini, Indonesia termasuk OGP Local dari Brebes mengirimkan komitmen berupa pembangunan pusat studi untuk anak tidak sekolah dan dewasa tidak sekolah (ATS-DTS) di Brebes (2021), akses proses

¹⁴ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/digital_governance/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

¹⁵ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/fiscal_openness/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

peradilan (2022), panduan aksesibilitas digital untuk kaum disabilitas (2022), hingga penguatan mekanisme pemulihan untuk korban kekerasan seksual (2022).¹⁶

Keadilan (*justice*)

Keterbukaan pemerintah dapat memastikan peningkatan akses keadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan mengubah sistem peradilan agar fokus pada keperluan keadilan masyarakat dan pada keputusan yang adil. Isu dalam aspek ini menyangkut akses keadilan, keadilan, dan peradilan terbuka.

OGP mencatatkan ada 135 komitmen dengan 34% di antaranya ambisius, 60% komitmen lengkap, dan 10% memiliki hasil awal yang kuat dalam isu akses keadilan. Lalu 350 komitmen (39% ambisius, 59% rampung, 17% hasil awal yang kuat) untuk isu keadilan. Sementara untuk isu peradilan terbuka, komitmen terdaftar mencapai 182 jenis dengan 44% tergolong ambisius, 64% telah selesai dicapai, dan 22% dengan hasil awal yang kuat.

Indonesia telah mendaftarkan komitmen terkait sejak 2011 seperti manual tata kelola dan konsultasi publik untuk mencapai SDGs (2016), peningkatan bantuan hukum (2018), pengembangan portal informasi bantuan hukum (2020), pemajuan ruang sipil dalam keadilan restoratif (2020), pelibatan masyarakat sipil dalam RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2020), maupun penguatan pengaturan bantuan hukum untuk kaum rentan (2022).^{17 18 19}

Partisipasi Publik (*public participation*)

Memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan masukan dalam penyusunan keputusan pemerintah dapat mendorong kepada tata kelola yang lebih efektif, peningkatan layanan publik, dan hasil yang berkeadilan. Dalam konteks pemerintahan terbuka, perumusan bersama tersebut memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik atas tindakan pemerintah melalui diskusi yang terorganisir. Proses demokrasi yang

¹⁶ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/people_with_disabilities/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

¹⁷ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/access_to_justice/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

¹⁸ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/justice/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

¹⁹ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/open_justice/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

deliberatif telah memberi bukti inovatif yang memadai dalam beberapa dekade ke belakang.

Terkait hal ini, ada 90 komitmen yang didaftarkan anggota OGP dengan 19% tergolong ambisius, dua komitmen rampung (belum terkaji menyeluruh), dan satu dari empat komitmen memiliki hasil awal yang kuat. Indonesia mendaftarkan program akuntabilitas sosial untuk layanan publik dan tata kelola desa pada 2022.²⁰

Hak atas Informasi (*right to information*)

Publik memerlukan akses informasi agar dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala keputusan-keputusannya. Hak atas informasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dimaksud, dengan banyak UU yang memerlukan pemerintah untuk proaktif mempublikasi informasi dimaksud. Pengumpulan dan publikasi data dan sejauh mana lembaga publik melaksanakan UU Keterbukaan Informasi membantu untuk mengukur perkembangan perlindungan hak atas informasi tersebut.

Ada 350 komitmen terdaftar dalam area kebijakan ini. Sebanyak 49% komitmen tergolong ambisius, 63% komitmen rampung, dan 18% memiliki hasil awal yang kuat. Indonesia mendaftarkan empat komitmen terkait diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam (2013), hingga memastikan akses terhadap informasi bantuan hukum (2022).²¹

Proses di OGP

Pemerintahan dan masyarakat sipil melalui OGP bekerjasama secara **kokreasi** untuk menyusun rencana aksi dua tahunan, dengan rencana, komitmen yang jelas untuk beragam cakupan isu. Model tersebut membuat organisasi masyarakat sipil dapat berperan membentuk dan mengawasi pemerintahan.

Setelah submisi ke OGP, pengawasan internasional dilakukan melalui mekanisme ***Independent Reporting Mechanism (IRM)***. IRM sebagai lengan akuntabilitas OGP dan mekanisme utama pelacakan perkembangan negara peserta. IRM bersifat independen, berbasis bukti, dan obyektif. Proses dilakukan melalui pelaporan dan rekomendasi tepat waktu dalam masa-masa penting di siklus rencana aksi. IRM diawasi oleh *International Experts Panel (IEP)*.

²⁰ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/mainstreaming_participation/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

²¹ https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/panel/explore/ajax/0/policy-area/right_to_information/policy-area-op/any/country/0/region/0/group/0/year/0/national-local/0/search_str/0/

OGP memiliki standar dalam penyusunan rencana aksi melalui kokreasi. Selain itu, OGP membuka peluang Forum Lintas Pemangku Kepentingan (*multistakeholder forum*) untuk proses kokreasi dimaksud.

Prinsip Panduan Standar kokreasi dan partisipasi OGP

Ada empat prinsip utama yang memandu pelaksanaan standar kokreasi dan partisipasi OGP, yang diterjemahkan lebih lanjut dari prinsip-prinsip [Open Government Declaration](#) yang disepakati seluruh anggota OGP.

- **Transparansi:** segala informasi terkait proses, aktivitas, keputusan, dan hasil OGP harus tersedia dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan yang berminat. Publikasi dan diseminasi informasi secara proaktif dalam format yang paling pas dan mekanisme yang memadai dalam seluruh rencana siklus serta menyediakan pembaruan perkembangan terkait pengembangan dan pelaksanaan komitmen.
- **Partisipasi inklusif:** Membuka ruang keragaman untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses OGP, mengidentifikasi prioritas, dan mengusulkan solusi. Melakukan penjangkauan ke minoritas ataupun kelompok masyarakat yang kurang terwakili dan memastikan akses informasi terkait peluang terlibat dan memberi masukan tersedia.
- **Akuntabilitas:** Menyediakan informasi yang jelas terkait hasil proses konsultasi dan hasil pelaksanaan komitmen. Informasi tersebut harus dapat menjelaskan, misalnya mengapa prioritas sejumlah pemangku kepentingan tidak masuk beserta alasan atas perubahan atau penundaan pelaksanaan komitmen.
- **Inovasi dan ambisi:** bertekad melebihi persyaratan minimum yang disampaikan dan berinovasi atas cara-cara mengembangkan, kokreasi, dan melaksanakan secara lebih ambisius dan transformatif untuk reformasi pemerintahan yang terbuka. Persyaratan minimum harus dilihat sebagai titik awal, bukan akhir.

PERSYARATAN MINIMUM OGP

- Ada ruang dialog terus menerus dengan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat sipil dan perwakilan non pemerintah lainnya, jika dipandang perlu. Ruang tersebut melakukan pertemuan secara reguler (setidaknya tiap enam bulan) dengan aturan dasar partisipasi publik.
- Ada website publik terkait keterlibatan di OGP.
- Ada repositori (tempat penyimpanan dokumen dan data) yang dapat diakses publik di web OGP terkait.
- Menampilkan proses kokreasi di website termasuk *timeline* yang diperlukan, atau ada mekanisme penjangkauan masukan dari pemangku kepentingan selama periode tertentu.

- Mendokumentasikan dan melaporkan kembali atau menerbitkan umpan balik tertulis mengenai bagaimana masukan pemangku kepentingan dipertimbangkan selama proses penyusunan.

OGP di Indonesia

Indonesia sebagai negara pendiri mulai mengikuti agenda OGP sejak 2011. Metode pelibatan OGP di Indonesia melalui OGI yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia.

Dasar hukum Indonesia bergabung ke OGP terwujud melalui Keppres No 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Open Government Partnership.

Saat ini Indonesia berada pada Rencana Aksi ketujuh (2023-2024). Beberapa inovasi yang lahir dari sejumlah rencana aksi OGP hingga saat ini di antaranya adalah: Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia (OGP Award 2023) maupun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! yang merupakan bagian dari Rencana Aksi (2018-2020).

Strategi OGP 2023-2028

OGP menyusun strategi lima tahunan dengan fokus pada:

1. Membangun komunitas reformis pemerintahan terbuka, aktivis, dan pembela yang semakin bertumbuh, berkomitmen, dan berjejaring;
2. Membuat pemerintahan terbuka sebagai pusat atas segala fungsi pemerintahan di setiap level dan di setiap cabang kekuasaan dan ketika mewujudkan prioritas-prioritasnya;
3. Melindungi dan memperluas ruang sipil;
4. Mengakselerasi perkembangan kolektif terkait reformasi pemerintahan terbuka;
5. Menjadi rumah inspirasi atas inovasi, eviden, dan kisah pemerintahan terbuka.

Visi OGP adalah agar pemerintahan terbuka bekerja sama dalam kemitraan dengan masyarakat sipil dan masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan hasil yang lebih baik.

Misi OGP adalah untuk menginspirasi, menghubungkan, dan memfasilitasi komunitas reformis dan pendukung dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk bertindak bersama.

OUR VISION IS OF OPEN GOVERNMENTS WORKING IN PARTNERSHIP WITH CIVIL SOCIETY AND PEOPLE TO STRENGTHEN DEMOCRACY AND DELIVER BETTER SOCIETAL OUTCOMES.

OUR MISSION IS TO INSPIRE, CONNECT, AND ENABLE AN EVER-GROWING COMMUNITY OF REFORMERS AND CHAMPIONS FROM GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY TO TAKE ACTION TOGETHER.



Strategic Goal 1

Build a growing, committed, and interconnected community of open government reformers, activists, and champions

- Build a stronger, more political global coalition for open government
- Invest in leadership development for reformers
- Expand strategic alliances and partnerships to reinforce open government principles



Strategic Goal 2

Make open government central to how all levels and branches of government function and deliver on their priorities

- Provide a flexible action framework fit for diverse contexts and needs
- Support mainstreaming of open government at all levels and branches of government work
- Be more responsive to windows of political opportunity



Strategic Goal 3

Protect and expand civic space

- Encourage civic space action and cultivate champions
- Enforce and periodically review OGP policies on civic space



Strategic Goal 4

Accelerate collective progress on open government reforms

- Raise the bar on transparency, accountability, participation, and inclusion
- Launch a Partnership-wide challenge to promote collective action on priorities for the Partnership



Strategic Goal 5

Become the home of inspirational open government innovations, evidence, and stories

- Develop, curate and share high quality content
- Create spaces for people to share their stories and connect

Inisiatif Open Parliament

Semangat OGP menjarlar kepada gerakan keterbukaan parlemen, yang mendorong jejaring masyarakat sipil menginisiasi penyusunan Deklarasi Keterbukaan Parlemen. Deklarasi tersebut pada akhirnya diluncurkan pada acara IPU – World e-Parliament di Roma, Italia, 2012 bertepatan pada Hari Internasional Demokrasi 15 September.

Deklarasi tersebut juga merupakan rangkuman dari berbagai komitmen dan hasil pertemuan organisasi antar-parlemen dan komunitas internasional yang membahas mengenai demokrasi dan juga parlemen. Deklarasi Keterbukaan Parlemen memiliki empat tujuan yakni:

- Mendorong kultur keterbukaan;
- Membuat informasi parlemen lebih transparan;
- Memudahkan akses ke informasi parlemen;
- Memberdayakan komunikasi elektronik atas informasi parlemen (IT).

Menyusuli Deklarasi tersebut, di level OGP, pada 2013 dibentuk Kelompok Kerja Keterbukaan Parlemen (*Legislative Openness Working Group*) dengan koordinator bersama dari Parlemen Chile dan juga *National Democratic Institute* (NDI). Pada November 2021, OGP merilis [*Memorandum on Parliamentary Engagement*](#), sebuah memo yang memberikan gambaran mengenai bagaimana parlemen dapat terlibat dalam agenda-agenda pemerintahan terbuka dan di OGP.

Secara spesifik, parlemen dapat memiliki peran seperti:

- Melakukan upaya-upaya legislatif dengan membela nilai-nilai pemerintahan terbuka dengan mendorong dan mensahkan legislasi terkait;
- Melakukan pengawasan parlemen sebagai upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah dan membuka ruang reformasi pemerintahan terbuka dan terbuka terhadap publik akan proses internal;
- Membuka proses parlemen melalui adopsi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inklusi, secara kelembagaan;
- Menciptakan ruang dialog dengan membangun perbincangan antarpantai dan menyiapkan dukungan untuk memajukan dan melembagakan reformasi pemerintahan terbuka.

Pendekatan OGP untuk Open Parliament

OGP membuka ruang bagi parlemen yang ingin terlibat di komunitas internasional tersebut dengan opsi berikut:

Integrasi Partisipasi pada proses OGP nasional atau lokal

Partisipasi parlemen pada proses nasional atau lokal dapat terdiri dari beragam bentuk yang memungkinkan sinergi antarcabang kekuasaan negara. Selain itu, keterlibatan dalam proses nasional atau lokal dapat mendorong efisiensi waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk kokreasi dan konsultasi, dan mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat sipil yang terlibat di OGP. Model ini kerap digunakan di berbagai negara.

Pendekatan yang dilakukan dengan berpartisipasi pada proses OGP nasional atau lokal dapat dilakukan melalui beberapa opsi berikut, termasuk tidak terbatas pada:

- Wakil dari parlemen (anggota, staff, ataupun keduanya) dapat terlibat di proses konsultasi dan aktivitas kokreasi dan implementasi lainnya. Secara ideal, lingkup keterlibatan termasuk pada hal-hal yang menjadi komitmen parlemen ataupun bisa juga dalam hal komitmen lain yang parlemen dapat dukung;
- Wakil dari parlemen dapat terlibat di forum multikepentingan (*multistakeholder forum/MSF*) untuk memastikan adanya dialog konsisten dengan masyarakat sipil. Mekanisme koordinasi lain dapat ditempuh, bila MSF formal tidak terselenggara;
- Parlemen dapat mempertimbangkan melibatkan komisi/badan dan staff dalam kelompok kerja atau diskusi tematik, mengorganisasi briefing untuk kelompok parlemen terkait, dan menyelenggarakan peluncuran dan pelaksanaan *Independent Review Mechanism (IRM)*;
- Parlemen dapat mendukung penyusunan komitmen dengan melakukan identifikasi legislasi terkait. Langkah ini mendorong dialog dan pembangunan konsensus antara mereka yang mengusulkan dan menyetujui dengan pertimbangan adanya peran parlemen yang dapat dilakukan seperti mengusulkan RUU, amendemen, atau penyediaan anggaran untuk pelaksanaan komitmen;
- Parlemen dapat menunjuk narahubung parlemen untuk kemudahan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah, pemangku kepentingan OGP lainnya dan Unit Pendukung (Sekretariat) OGP;
- Parlemen dapat memajukan reformasi pemerintahan terbuka dengan mengawasi pelaksanaan komitmen OGP, menyediakan anggaran, atau mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan laporan.

Apabila langkah integrasi yang ditempuh, maka, parlemen komit mengikuti persyaratan sebagai berikut:

- Mengikuti standar partisipasi dan kokreasi yang mengelola kokreasi dan pelaksanaan komitmen OGP dan rencana aksi nasional. Panduan OGP lokal, yang mengatur kokreasi dan pelaksanaan komitmen lokal dan rencana aksi.
- Apabila perwakilan parlemen berpartisipasi pada platform MSF, mereka harus mematuhi praktik dan aturan yang dimiliki forum.
- Komitmen yang dibuat parlemen atau komitmen yang didukung parlemen harus terintegrasi dengan rencana aksi keseluruhan dan menyesuaikan dengan jadwal mula dan akhir rencana aksi OGP.
- Parlemen juga perlu mengikuti mekanisme pelaporan dan pengawasan reguler yang diperlukan dari seluruh pelaksana komitmen OGP.
- Komitmen parlemen akan dikaji oleh IRM. Parlemen dapat menyelenggarakan kelompok kerja lintaspihak sendiri untuk menentukan skop dan substansi komitmen, namun tidak terpisah dari IRM.²²

Panduan lebih detail terkait hal ini dapat dibaca di [*Parliamentary Engagement in National OGP Processes: Menu of Options*](#).²³

Partisipasi melalui penyampaian rencana keterbukaan parlemen terpisah.

Dalam pelaksanaan OGP, dimungkinkan pula untuk parlemen, karena pertimbangan pemisahan cabang kekuasaan negara dan kesetaraan kelembagaan dalam konstitusi, menyusun rencana aksi keterbukaan secara terpisah dari pemerintah.

Apabila proses ini ditempuh, parlemen terkait harus menyampaikan informasi mengenai niatan tersebut secara tertulis ke Sekretariat OGP. Niatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Parlemen, Sekretaris Jenderal, atau dari Pimpinan komisi/badan atau kelompok kerja dengan mandat terkait pemerintahan terbuka.

Komunikasi dapat dilakukan dengan berkoresponden dengan Rosario Pavese, Penasihat Senior Keparlemenan OGP melalui email di rosario.pavese@opengovpartnership.org dan Koordinator Regional Senior dari OGP. Kopi notifikasi tertulis tersebut juga disampaikan ke OGP point of contact nasional.

²² <https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2025/05/EN-Parliamentary-Engagement-in-National-OGP-Process-Menu-of-Options.pdf>

²³ <https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2025/05/EN-Parliamentary-Engagement-in-National-OGP-Process-Menu-of-Options.pdf>

Dalam kurun waktu tiga bulan setelah penyampaian notifikasi tertulis, parlemen perlu mengonfirmasikan (i) penunjukan Narahubung OGP Parlemen; (ii) mekanisme awal untuk dialog MSF yang akan digunakan untuk kokreasi rencana aksi parlemen OGP; (iii) durasi rencana aksi parlemen dan target penyampaian.

Persyaratan minimum agar renaksi parlemen dapat diterima dalam kerangka OGP dan dapat menggunakan logo OGP adalah:

- Penyampaian notifikasi tertulis yang mencakup detail narahubung parlemen.
- Penunjukan narahubung parlemen.
- Bukti adanya proses masukan dan umpan balik publik dalam penyusunan Renaksi.
- Penyampaian tepat waktu laporan pengkajian pelaksanaan komitmen.

Narahubung Parlemen (OGP Parliament Liaison)

Bertanggungjawab untuk komunikasi dan koordinasi dengan Unit Pendukung OGP, Kontak OGP Nasional, dan pemangku kepentingan lain dari Renaksi Parlemen.

- ✓ Penunjukan diskresi parlemen.
- ✓ Bisa dari pejabat administratif/teknis senior, penasihat/tenaga ahli pimpinan atau komisi/badan, staf dari komisi/badan terkait.
- ✓ Parlemen dapat memiliki lebih dari satu staf untuk mengurus OGP.
- ✓ Nama, penunjukan, dan kontak dari narahubung parlemen harus disampaikan ke Unit Pendukung OGP dalam tiga bulan selepas notifikasi tertulis untuk memulai Renaksi parlemen terpisah.

Pimpinan Parlemen OGP

OGP juga menyambut penunjukan Pimpinan Parlemen yang terlibat dalam proses OGP.

- ✓ Anggota parlemen yang menjabat di panitia kerja (Panja) atau badan relevan.
- ✓ Berperan untuk mewujudkan kepemimpinan politik terkait agenda OGP di parlemen, dan membangun kesepakatan kelembagaan dan lintaspartai terkait proses dan rencana aksi OGP.

- ✓ Pimpinan parlemen OGP akan berinteraksi dengan pemangku kepentingan OGP lainnya dalam dukungan sesama (*peer exchanges*), baik dalam pertemuan regional ataupun global.

Sumber: [Guidance for OGP Parliamentary Action Plans](#)

Memajukan keterbukaan di luar platform OGP.

Parlemen dapat pula terlibat membangun agenda keterbukaan, meskipun tidak berada dalam kerangka kerja dan platform OGP. Beberapa contoh yang dapat dilakukan adalah seperti membentuk MSF atau lembaga serupa untuk memastikan keterwakilan setara antara parlemen dan mitra masyarakat sipil, menggunakan sumber daya dan kesempatan yang disediakan komunitas parlemen terbuka, memanfaatkan komunitas pemerintahan terbuka untuk berbagi pengalaman, menunjukkan hasil dan terlibat dalam pembelajaran atau dukungan lebih lanjut.

Parlemen yang terbuka—yang mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di seluruh tahapan proses kerja legislatif—adalah bagian penting dari pemerintahan yang terbuka. Memastikan akses terkait informasi legislatif dan menciptakan mekanisme untuk partisipasi publik dan akuntabilitas adalah fondasi untuk mewujudkan hubungan yang terbuka dan saling mempercayai dengan rakyatnya. Parlemen dapat juga memimpin dengan menjadi contoh dalam adopsi prinsip pemerintahan terbuka, dalam proses dan kerja mereka, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kepada rakyat.

Open Parliament Indonesia (OPI)

Inisiatif Open Parliament di OGP semakin berkembang dari masa ke masa dengan sebagian agenda melalui kolaborasi bersama dengan pemerintah dan masyarakat sipil, atau secara terpisah mengajukan rencana aksi tersendiri.

Aksi kunci yang selama ini menjadi fokus Open Parliament di OGP adalah: Transparansi Legislasi, Partisipasi Publik dalam Pembuatan Keputusan, Akuntabilitas Parlemen.

Indonesia mendeklarasikan perwujudan Rencana Aksi Keterbukaan Parlemen sejak 2018 dengan menyampaikan Renaksi ke OGP untuk periode 2018 – 2020 dan 2020 – 2022.

Salah satu hasil signifikan dari Renaksi tersebut adalah meningkatnya sistem informasi legislatif (Sileg) agar proses legislasi dapat transparan dengan peningkatan tampilan antarmuka yang lebih mudah dilacak status pembahasan legislasi *by process and by*

time.²⁴ Meski demikian, dinamika proses legislasi masih memerlukan penguatan secara dasar hukum untuk menegaskan mekanisme penayangan data *real time*, ataupun jangka waktu (durasi) ideal pengunggahan dokumen setelah pembahasan.

Renaksi pada parlemen sejak 2019 diperkuat oleh keberadaan Tim Pengawas OPI di level Pimpinan DPR. Pada periode 2024-2029, melalui Panitia Kerja (Panja) OGP di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), DPR RI merencanakan proses penyusunan Renaksi Keterbukaan Parlemen yang terintegrasi dalam proses OGP Nasional Indonesia.

OGP Local

Bermula dari proyek percontohan OGP bertajuk Program Subnasional pada 2016.

Proyek percontohan melibatkan 15 pemerintahan daerah yang diseleksi melalui proses ketat. Mereka adalah: Kabupaten Bojonegoro, Indonesia (1,4 juta jiwa penduduk); Provinsi Ontario, Kanada (13,5 juta jiwa); Kota Sao Paulo, Brasil (11,9 juta jiwa); Distrik Kigoma-Ujiji, Tanzania (215 ribu jiwa); Skotlandia, UK (5,2 juta jiwa); Negara Bagian Jalisco, Meksiko (7,3 juta jiwa); Kota Austin, AS (885 ribu jiwa); Distrik Tbilisi, Georgia (1,1 juta jiwa); Wilayah La Libertad, El Salvador (1,8 juta jiwa); Kota Madrid, Spanyol (3,2 juta jiwa); Daerah Elgeyo Marakwet, Kenya (400 ribu jiwa); Kota Buenos Aires, Argentina (2,8 juta jiwa); Kota Paris, Prancis (2,2 juta jiwa); Perkotaan Seoul, Korea Selatan (10 juta jiwa).²⁵

Saat ini hanya Bojonegoro dan Kigoma Ujiji yang tidak berlanjut dalam proses OGP.

Di Indonesia, sedikitnya delapan pemerintahan daerah tergabung sebagai OGP Local yakni:

1. Provinsi Jawa Barat – rencana aksi belum terdata
2. Provinsi DIY – [rencana aksi 2024 - 2027](#)
3. Kota Madiun – rencana aksi belum terdata
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat – [rencana aksi 2021 - 2023](#)
5. Kota Semarang – [rencana aksi 2021 - 2023](#)
6. Kabupaten Brebes – [rencana aksi 2021 - 2024](#)
7. Kabupaten Sumbawa Barat – [rencana aksi 2021 - 2023](#)
8. Kabupaten Banggai – [rencana aksi 2021 - 2024](#)

²⁴ Sebelum OPI berdiri, Sileg di web DPR hanya berupa informasi tabel-tabel yang sulit dibaca dan dilacak prosesnya.

²⁵ https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/OGP_SNAP-Report_2017.pdf

II – AKTIVITAS DAN TEMUAN PANJA OG-P

Aktivitas Panja OG-P

FGD Tangerang: Mendorong Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Melalui Parlemen Terbuka di Indonesia



Panja mengawali aktivitasnya dengan menghadiri diskusi kelompok terpumpun/FGD yang diorganisir WFD bertajuk *Mendorong Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Melalui Parlemen Terbuka di Indonesia*, Rabu (19/3). FGD tersebut menghadirkan beragam pakar dan advokat keterbukaan dan transparansi seperti Yanuar Nugroho OGP Envoy, Dewi Barnas OGP *Senior Regional Coordinator for Asia*, Maharani S Wibowo Focal Point OGI, birokrat dari Kemen PANRB Cahyono Tri Wibowo Deputy Transformasi Pemerintahan Digital, akademisi seperti Abdul Gaffar Karim PolGov UGM, hingga pegiat muda Afutami Think Policy.

Panja menghadiri FGD dengan beberapa misi awal yakni untuk mendalami agenda-agenda keterbukaan pemerintah baik pusat maupun daerah, memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil, hingga mengkaji potensi rencana integrasi RAN OPI dan OGI. FGD juga menjangkau masukan mengenai peluang agenda OGP ke depan di parlemen.

Atas partisipasi dalam FGD terkait Panja menegaskan komitmennya menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi antarpemangku kepentingan. Panja juga mendapatkan masukan OMS untuk dapat melakukan evaluasi terhadap sistem informasi legislasi yang ada saat ini, dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada Pimpinan DPR RI untuk

perbaikan sistem agar lebih akomodatif terhadap kebutuhan transparansi dan partisipasi publik.



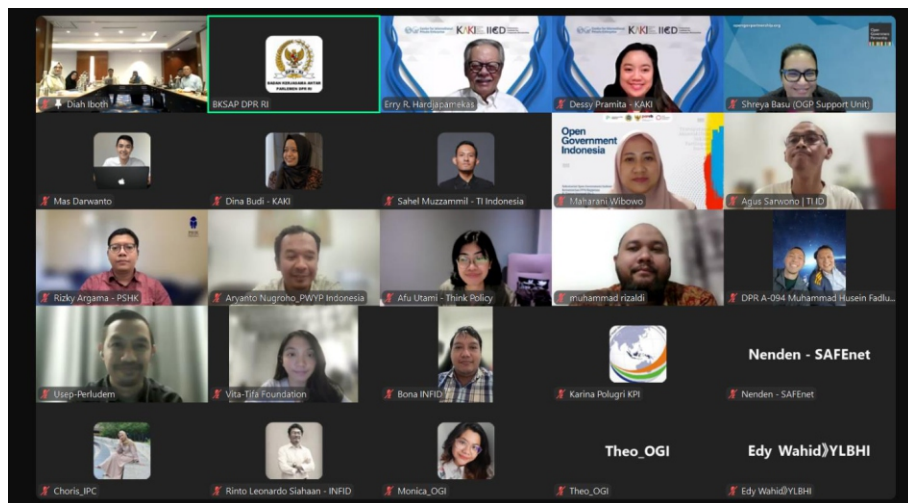
Pada diskusi tersebut aspirasi mengemuka juga mengenai perlunya pemerintah memperkuat peraturan terkait OGI. Hal ini diperlukan secara prinsipil untuk pengarusutamaan nilai-nilai keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam bernegara, tetapi juga untuk memberi landasan yang lebih kuat untuk kelembagaan OGI. Sejauh ini komitmen keterlibatan dalam OGP baru ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada OGP tanpa keterangan detail mengenai upaya pengarusutamaan hingga mekanisme lanjutannya.

Panja juga menyepakati pola integrasi Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia (RAN OPI) dengan Rencana Aksi *Open Government Indonesia* (OGI). Integrasi ini dimaksudkan untuk menyinergikan seluruh program kerja keterbukaan pemerintahan dan parlemen agar lebih terarah, efisien, dan berdampak luas.



Pada akhir diskusi, seluruh peserta dan narasumber berkomitmen mendukung revitalisasi Open Parliament Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan *good governance* di Indonesia dengan target implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Diskusi penyusunan rencana tindaklanjut



Usai mengelat program perdananya pada 18-20 Maret 2025, Panja OGP pada 17 April 2025 melakukan aksi tindak lanjut untuk pendalaman diskusi dengan format campuran. Pada program kedua tersebut Panja kembali bermitra dengan WFD menggandeng sejumlah organisasi OMS antara lain IPC, KAKI, Koordinator Nasional PWYP, TII, Think Policy, INFID, PSHK, IJRS, serta kehadiran OGP Regional Coordinator dan lain sebagainya.

Ketua Panja M. Hussein Fadlulloh, sangat mengapresiasi kehadiran para peserta FGD dan menilainya sebagai mitra yang sangat strategis. Wakil Ketua BKSAP itu menyampaikan bahwa program kedua Panja ini merupakan tindak lanjut dari FGD sebelumnya pada Maret 2025. Ia kemudian menegaskan bahwa Panja OG-P dan BKSAP dalam kewenangannya sesuai dengan UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI memiliki keterkaitan sebagai perwajahan Indonesia di dunia parlemen baik secara multilateral maupun bilateral. Namun demikian, Hussein menilai keterkaitan dalam kerangka hubungan bilateral dan multilateral tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks nasional.

Panja berharap FGD tersebut dapat mengerucut menjadi aspirasi dan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Panja OG-P.

Sementara itu Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, menyinggung latar belakang pembentukan Panja OG-P. Ia menyampaikan bahwa ide Panja menyeruak usai Delegasi BKSAP diundang pada perhelatan Konferensi OGP Asia dan the Pacific Regional Meeting di Filipina pada Februari 2025 lalu. Mardani menilai bahwa BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dalam kaitan diplomasi parlemen mencoba untuk mendorong penguatan pelaksanaan keterbukaan di level nasional secara umum. Panja OG-P diharapkan dapat meningkatkan kembali peran dan implementasi keterbukaan parlemen. Dalam kaitan penguatan Panja tersebut, Mardani mengajak semua peserta FGD untuk menyampaikan gagasan dan masukan.

Aspirasi yang menguat dalam konteks upaya menghidupkan kembali OPI adalah integrasi rencana aksi nasional antara DPR dan pemerintah. Ketua BKSAP menindaklanjuti dengan usulan agar ada tim khusus di Sekretariat Ketua DPR yang fokus pada isu OGP.

Dilanjutkan Mardani bahwa Panja ke depan akan ikut mendorong performa pemerintah lokal yang tergabung dalam OGP lokal dalam melaksanakan rencana aksi (Renaksi). Ia menyampaikan bahwa Panja OG-P dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja untuk bertemu dan berdialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kerangka menggali lebih jauh terkait rencana aksi OGP dan mekanisme pelaksanaannya. Lantas ia mengajak OMS lokal untuk dapat berdialog dengan Panja OG-P.

Panja memaparkan telah menyusun peta jalan tugas sejalan dengan kewenangannya dan telah memberikan arahan kepada tim teknis dan tenaga ahli untuk dapat membuka kegiatan secara lebih luas.

Sebelum sesi dialog terbuka dengan OMS, Tim Teknis dan Tim Ahli Panja OG-P menyampaikan program kerja Panja dalam enam bulan ke depan yang bertujuan: (1) memperkuat advokasi dan pemahaman kembali di lingkup DPR mengenai urgensi keterbukaan dan transparansi dalam beragam kerja parlemen; (2) mengidentifikasi praktik cerdas yang dapat menjadi agenda *showcase* di level internasional di OGP; (3) memperkuat rencana aksi keterbukaan nasional dengan integrasi peran parlemen dan pemerintah.

Sementara beberapa program kerja yang diusulkan Tim untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah: (1) penyusunan *knowledge products* seperti kertas posisi atau lembar fakta dan lainnya untuk penguatan advokasi dan pemahaman kembali urgensi keterbukaan dan transparansi dalam kerja-kerja parlemen; (2) penyusunan rekomendasi akhir Panja OG-P untuk memperkuat agenda nasional terkait keterbukaan dan transparansi dalam rangka mendukung diplomasi parlemen di level multilateral; (3) misi lapangan ke OGP locals atau daerah yang berpotensi menjadi calon anggota OGP locals

untuk monitoring dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam menyusun atau melaksanakan Rencana Aksi Keterbukaan yang akan disampaikan atau telah disampaikan ke OGP; (4) mengelat rangkaian FGD maupun seminar untuk pendalaman isu terkait OGP.

Pada sesi dialog terbuka, sejumlah mitra strategis Panja OG-P diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pemikirannya. Pada sesi tersebut, Indonesia Country Director WFD, Ravig Patra, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Panja dalam agenda OGP. Ia menyampaikan bahwa WFD sebagai mitra BKSAP berperan sebagai fasilitator dan mendorong OMS agar lebih lanjut berinteraksi secara terbuka dan langsung dengan Panja, tanpa harus melalui WFD. Ravig kemudian mengharapkan agar ada penjelasan lebih lanjut agenda setelah masa kerja Panja berakhir. Hal tersebut menurut Ravig agar ada kepastian agenda keterbukaan dan transparansi ke depan.

Sementara itu Chief, Country and Local Programs OGP, Shreya Basu, menyambut baik perkembangan seperti Panja OG-P di parlemen, terlebih dengan keinginannya untuk integrasi proses keterbukaan. Berbicara secara daring, Basu menilai Indonesia sangat penting dalam OGP dan instrumental dalam peran kepemimpinannya di OGP. Ia mengungkapkan parlemen dapat berperan dalam mendukung renaksi keterbukaan melalui legislasi itu sendiri, atau mendukung ketersediaan legislasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut dijelaskan Basu bahwa keberadaan anggota parlemen lintasfraksi dapat menjadi peluang bagi penguatan pengawasan terhadap eksekutif atau pemerintah dalam melaksanakan Renaksi. Untuk hal tersebut, ia menyarankan agar diselenggarakan dialog lintasfraksi dan pemangku kepentingan agar isu-isu yang ada tidak terdistorsi informasinya.

Hal lain disampaikan Basu, parlemen dapat berperan dengan mendorong keterbukaan di lembaga legislatif itu sendiri. Ia menilai bahwa dengan transparan dan menginformasikan secara terbuka dan tepat waktu segala catatan *voting*, rapat-rapat dan risalahnya, hingga membangun mekanisme partisipasi publik yang bermakna, itu semua dapat menjadi contoh bagaimana parlemen dapat berkontribusi ke isu keterbukaan dan transparansi.

Sebagai penutup, Basu menyimpulkan tiga hal yang menjadi perhatian yakni: (i) proses; (ii) partisipasi legislatif; (iii) peran dan kepemimpinan yang tidak seimbang. Kemudian Basu mengharapkan pada OGP Summit 2025 di Vitoria-Gasteiz, Spanyol Oktober 2025 mendatang akan mencuat peran kepemimpinan dan contoh praktik baik dari Asia, termasuk mungkin dari Indonesia.

Sementara itu, Focal Point OGI (Bappenas), Maharani Putri Wibowo, menyambut baik rencana integrasi Renaksi Pemerintah dan DPR dan akan berdiskusi secara teknis

dengan Tim Teknis Panja dan menggali target yang dapat dicapai dalam dua tahun ke depan.

Penting dicatat, berbagai OMS pada FGD tersebut secara aktif menyampaikan sejumlah pandangan, antara lain:

- OMS sebagai jembatan keterhubungan antara parlemen dan publik dalam kerangka penguatan demokrasi;
- OMS meminta DPR menaruh perhatian besar pada proses legislasi agar DPR semakin dipercaya oleh publik;
- Adanya urgensi pembuatan peta jalan OGP yang terintegrasi dan terukur yang merinci hal-hal yang bisa dilakukan oleh parlemen, pemerintah dan masyarakat sipil;
- Perlunya memunculkan *champion* OGP di tiga pilar pemangku kepentingan;
- Penekanan implementasi OGP yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, termasuk prinsip kokreasi, perencanaan, target, dan pelembagaannya;
- Adanya sejumlah tantangan terkait OGP Indonesia (OGI) terutama terkait regulasi dan pendanaan;
- Kepastian keberlanjutan isu keterbukaan dan transparansi di parlemen pascamasa tugas Panja berakhir;
- Sorotan atas tantangan OGP dalam kaitan hubungan pusat dan daerah, kapasitas Teknologi Informasi, dan inklusivitas aspirasi publik;
- Dorongan ke Panja OG-P untuk menghasilkan sesuatu yang implementatif seperti dorongan atau rekomendasi kepada DPR secara umum, khususnya dalam keterbukaan proses legislasi yang lebih baik;
- Peran DPR untuk memperkenalkan OGP locals ke pemerintahan daerah yang menjadi cakupan konstituen masing-masing;
- Harapan agar Panja dapat menemukan pendekatan dan model yang lebih efektif untuk pengarusutamaan OGP baik di parlemen, regional, dan pengawasan terhadap Renaksi pemerintah.

FGD rencana tindaklanjut tersebut menjadi contoh upaya menyatukan pemerintah, parlemen dan masyarakat sipil dalam kerangka penguatan OGP.

Ketua BKSAP juga menegaskan bahwa BKSAP sebagai penjurur Panja OG-P memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan masyarakat ke DPR dan juga komisi-komisi di DPR. Ia menjelaskan bahwa BKSAP akan melakukan kerja-kerja internal terutama untuk mencoba menjangkau perwakilan dari seluruh Alat Kelengkapan DPR ketika meluncurkan hasil rekomendasi Panja OG-P. Ia berharap pada agenda peluncuran tersebut BKSAP dapat menciptakan kolaborasi antar-*champion* termasuk di tingkat komisi. Namun demikian Mardani mengingatkan bahwa Panja OG-P saat ini berperan

untuk membuka keran agar masyarakat sipil dapat memiliki akses ke dalam DPR dengan fasilitasi dari Tim Teknis dan Tim Ahli Panja.

Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OGP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat pada 29 April 2025 di Bandung. Pertemuan diterima oleh Asisten Daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan kunjungan ini adalah memantau praktik pemerintahan terbuka di tingkat daerah serta menggali inisiatif yang dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Jawa Barat dipilih karena sejak April 2024 telah resmi ditetapkan sebagai anggota OGP Local bersama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Madiun, setelah melalui proses seleksi global yang ketat. Status ini menjadikan Jawa Barat penting untuk dipelajari lebih lanjut, terutama dalam hal komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan inovasi pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa meskipun telah terpilih sebagai anggota OGP Local, hingga kini daerah tersebut masih belum menyusun Rencana Aksi Daerah (Renaksi) OGP. Padahal, penyusunan renaksi merupakan langkah penting agar prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dapat terimplementasi secara sistematis. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah memulai sejumlah inisiatif yang mendukung agenda keterbukaan, antara lain pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekosistem kolaborasi multipihak. Kolaborasi ini melibatkan akademisi,

dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi terwujudnya tata kelola yang lebih terbuka.



Pemerintah juga menyoroti program unggulan seperti Jabar Digital Academy, yaitu pelatihan gratis bagi warga Jawa Barat di bidang pemasaran digital, pemrograman, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Program ini ditujukan bagi siswa SMK, masyarakat umum yang kurang mampu, UMKM, dan BUMDes. Program ini didukung mitra seperti *Amazon Web Services*, Lintas Artha, dan Pemerintah Inggris, sehingga memperkuat aspek keberlanjutan dan relevansi materi pelatihan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah meluncurkan aplikasi Sapawarga yang mengintegrasikan berbagai layanan publik agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah juga menyelenggarakan survei kepuasan publik secara berkala melalui Portal Jabar untuk memantau kualitas layanan.

Panja mencatat bahwa Jawa Barat menghadapi tantangan besar sebagai provinsi dengan hampir seperlima populasi nasional. Permasalahan yang dihadapi mencakup pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan yang menuntut kebijakan penganggaran dengan skala prioritas yang jelas. Di sisi lain, terdapat ketidakmerataan infrastruktur dan literasi digital, terutama di wilayah pedesaan, yang menghambat inklusivitas partisipasi publik. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu mengakses layanan digital dengan yang belum terjangkau. Panja juga menemukan bahwa DPRD Jawa Barat belum mengetahui secara memadai mengenai OGP. Padahal, DPRD seharusnya berperan penting dalam mendukung kebijakan OGP, baik melalui fungsi legislasi maupun pengawasan.



Dalam diskusi, Panja menyoroti pentingnya koordinasi erat antara eksekutif dan legislatif agar agenda OGP tidak sekadar bergantung pada kepemimpinan tertentu. Agenda OGP perlu dijalankan secara berkelanjutan melalui regulasi yang jelas dan alokasi anggaran dalam APBD. Panja juga menekankan perlunya strategi keberlanjutan untuk program pelatihan digital, peningkatan literasi data, serta pengembangan kanal aduan masyarakat yang responsif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam memantau kinerja pemerintah daerah dan turut serta dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan pemerintah daerah yang teridentifikasi meliputi belum adanya regulasi khusus terkait OGP, keterbatasan koordinasi lintas pemerintahan, serta tantangan dalam memastikan inklusivitas layanan digital. Walaupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas serta Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2012 tentang pelaksanaannya, regulasi tersebut belum secara khusus dikaitkan dengan OGP Local. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa meskipun digitalisasi terus ditingkatkan, pelayanan tatap muka tetap dibutuhkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan fisik dianggap penting sebagai bentuk aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital.

Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi DIY



Kunjungan kerja Panja OG-P BKSAP DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada 30 April - 2 Mei 2025 merupakan upaya BKSAP DPR RI ikut berpartisipasi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan terbuka di Indonesia. Berbeda dengan kunjungan pengawasan pada umumnya, Panja bertujuan menggali praktik baik implementasi OGP di DIY, mendapatkan masukan dan informasi bagi perbaikan OGP kedepan. Berdasarkan data-data yang didapatkan di lapangan, diharapkan dapat mendukung kolaborasi Open Parliament Indonesia dan Open Government Indonesia. Kunjungan Panja OGP ke Yogyakarta berdasarkan saran dan informasi dari Bappenas yang menyatakan bahwa DIY adalah sebagai salah satu daerah dengan kinerja OGP lokal terbaik di Indonesia.

Dalam pertemuan antara Panja dengan Pemerintah Provinsi DIY, terungkap DIY telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) OGP yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota se DIY.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menjelaskan bahwa partisipasi DIY dalam OGP bukan sekadar formalitas administratif, tetapi komitmen nyata dari Pemprov DIY membangun pemerintahan yang transparan, inklusif, responsif, dan partisipatif. Program OGP menurut Sekda DIY, merupakan bagian dari implementasi Visi dan Misi Gubernur DIY sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027.

Maka dengan itu, OGP dilaksanakan dengan terencana dan terpadu, agar cita-cita Gubernur DIY terwujud dalam gerak pemerintahan. Dan, komitmen tersebut terwujud ketika Pemda DIY mengajukan proposal ke OGP pada tanggal 22 Januari 2024.

Gayung bersambut, Pemerintah Provinsi DIY diterima *Open Government Partnership* pada 16 April 2024. Dan, Pemprov DIY merupakan salah satu dari 55 pemerintah daerah yang diterima dalam program OGP Lokal 2024.

Keunikan DIY terletak pada kemampuan menciptakan sinkronisasi program OGP lintas tingkat pemerintahan dengan didukung oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Perkumpulan IDEA. Program OGP lokal dapat menyatukan semua jajaran pemerintah. Meski menurut UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terpisah. Akan tetapi dalam OGP dapat menghapus hambatan-hambatan tersebut secara baik. DIY membuktikan bahwa koordinasi antar tingkat pemerintahan dapat dilakukan secara beriringan dan efektif. Khususnya dalam program penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan.



Dalam program penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan, Pemprov DIY berhasil membangun koordinasi efektif yang didukung Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini tertuang dalam beberapa peraturan gubernur (Pergub). Pergub-pergub tersebut menjadi dasar pelaksanaan program, berdasarkan prinsip-prinsip OGP yakni transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

Untuk program penanggulangan bencana termaktub dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Rencana Kontingensi Bencana Siklon Tropis. Pergub ini menjadi dasar program rencana kontigensi (Renkon).

Renkon merupakan panduan aksi antisipatif yang diturunkan menjadi Juknis *Anticipatory Action Protokol* (AAP) untuk mendukung respon dini. Juknis tersebut menjelaskan pelibatan seluruh jajaran pemerintah daerah, FPRB, dan akademisi guna memastikan respons yang cepat, kolaboratif, dan partisipatif dalam mengurangi dampak bencana melalui peringatan dini.

Sedangkan dalam RAD terkait program penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY No. 120 tahun 2022 yang mengatur pedoman penanggulangan kemiskinan, program tersebut memiliki prioritas pada 15 lokus, dengan sasaran rumah tangga miskin, mendorong pelibatan masyarakat, dan penguatan UMKM. Target penurunan kemiskinan DIY tahun 2023 sebesar 10,66% sesuai RPJMD 2022–2027. Program pengentasan kemiskinan ini telah dijalankan menggunakan dana keistimewaan.

Pencapaian RAD tersebut mencerminkan kerjasama kolektif masyarakat Yogyakarta dalam mendorong reformasi tata kelola berbasis keterbukaan. Rencana aksi tersebut berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital, penguatan data terbuka, dan keterlibatan publik secara masif, sehingga menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terkait dengan penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan.



Implementasi OGP di DIY didukung infrastruktur digital yang solid, untuk itu Pemprov DIY membangun jaringan fiber optik di 392 desa di seluruh DIY. Konektivitas ini memungkinkan akses informasi publik dan layanan daring yang luas dan merata. Pemanfaatan media sosial, portal daring, dan sistem informasi kebencanaan mempercepat komunikasi pemerintah-warga, khususnya dalam kondisi darurat. Untuk mendukung platform digital maka sejak tahun 2022, Gubernur DIY menerbitkan

Keputusan Gubernur DIY No. 251/KEP/2022 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022–2024 untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan data di DIY agar sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia secara akurat dan terpadu.

Program informasi kebencanaan dan pengentasan kemiskinan telah memanfaatkan jaringan desa, kelurahan, dan sekolah menengah sebagai basis implementasi program informasi kebencanaan. Program informasi kebencanaan mendorong kerjasama masyarakat untuk berbagi informasi sehingga tanggap bencana dapat segera dilaksanakan. Sebagaimana telah diketahui, sebagian DIY merupakan wilayah rawan bencana, baik itu berupa erupsi Gunung Merapi dan potensi gempa bumi. Gempa Yogyakarta tahun 2006 dan seringnya erupsi Gunung Merapi telah menyadarkan Pemprov DIY untuk menjalankan program informasi kebencanaan secara permanen. Program ini telah menyatukan informasi berbasis digital dan kearifan lokal dengan didukung jajaran pemerintah dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program OGP digawangi oleh Dinas Kominfo Pemprov DIY. Dinas ini dianggap mampu menjadi penanggung jawab, karena back bone dari program OGP adalah platform digital. Platform digital diharapkan memudahkan koordinasi antar instansi dengan masyarakat. Untuk itu Pemprov DIY membangun platform digital yang dalam penganggaran, agar mampu mendorong pengambilan keputusan secara cepat dan efektif.

Bedasarkan temuan di lapangan, salah satu kunci keberhasilan OGP di DIY terletak pada komitmen transparansi. Transparansi anggaran tersebut telah mendorong LSM bersedia menjadi mitra konstruktif. Keterlibatan LSM dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, menciptakan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Jauh sebelum tergabung dalam OGP lokal, Pemerintah Provinsi DIY telah mengembangkan berbagai inovasi tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam anggaran. Sejak 10 tahun yang lalu, Gubernur DIY melakukan pengawasan proses penganggaran melalui aplikasi *Sengguh* untuk memastikan transparansi proses birokrasi berjalan dari hulu ke hilir. Dimana dalam aplikasi tersebut ada sistem barcode untuk memantau kinerja kepala desa dan lurah di DIY secara transparan. Lebih dari itu, untuk memudahkan masyarakat memantau aliran anggaran, Pemprov DIY menyediakan portal *Jogja.co.id*. Dengan portal tersebut, masyarakat dapat memantau aliran anggaran secara *real time*. Sehingga dengan portal tersebut, mendorong terciptanya akuntabilitas finansial.

Yang pasti, transparansi dalam sistem penganggaran memudahkan proses pengambilan keputusan. Sehingga, secara operasional Platform digital mampu menjadi tulang punggung akuntabilitas keuangan daerah sekaligus memudahkan implementasi program OGP.

Lebih jauh dari itu, program OGP juga menggunakan pendekatan *bottom-up*, dengan melakukan uji coba program sebelum menjadi peraturan gubernur. Sehingga ketika program-program terkait OGP diimplementasikan, relatif mampu menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah.

Untuk mendukung terlaksananya program-program pemerintah, maka sebelum perumusan peraturan daerah, Pemprov DIY telah menyamakan visinya dengan DPRD melalui Pokir. Dengan Pokir tersebut menjamin setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat bekerja secara efektif. Termasuk diantaranya, Dinas Kominfo selaku penanggungjawab program OGP. Dengan demikian, kolaborasi Pemprov DIY, DPRD DIY, pemerintah kab/kota se DIY, dan partisipasi LSM telah menyukkseskan OGP di DIY.

Strategi menyamakan visi dan misi Pemprov DIY dengan DPRD DIY dan semua jajaran pemerintahan, dapat menjelaskan bahwa hambatan koordinasi pada dasarnya dapat dikurangi. Manakala komunikasi antar instansi pemerintahan dilakukan secara baik. Hal tersebut juga menegaskan bahwa hambatan berupa ego sektoral pada dasarnya dapat dipatahkan.

Terlepas dari keberhasilan tersebut, program OGP juga menghadapi tantangan serius. Tantangan tersebut serangan *hacker* terhadap platform digital. Ancaman siber tersebut kerap kali muncul, apalagi ketika hari libur. Untuk mengatasinya Pemprov DIY menyiapkan SDM yang handal dan secara bergantian menjaga seluruh platform yang ada. Menurut Sekda DIY, serangan bertubi-tubi tersebut diduga dilakukan oknum lokal yang menguasai teknologi informasi, namun memiliki kepribadian yang kurang baik, sehingga secara iseng mengganggu sistem informasi digital DIY.

Secara umum, Pemerintah Provinsi DIY telah membuktikan bahwa kebijakan lokal dapat menjadi bagian dari solusi global. Pemerintahan terbuka tidak hanya sekadar transparansi data, tetapi juga soal membangun atas kepercayaan dan ruang partisipasi yang luas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan data-data yang didapatkan, maka keberhasilan program OGP di Pemprov DIY disebabkan dua fondasi utama, yakni: sumber daya manusia yang handal dalam bidang teknologi informasi dan alokasi anggaran yang memadai. Sehingga dua fondasi tersebut menjamin keberlanjutan sistem digital yang aman dan terpercaya. Dengan fondasi SDM handal dan anggaran memadai, OGP menjadi instrumen strategis menanamkan jiwa *good governance* dalam kehidupan birokrasi.

Jejaring Internasional: Pertemuan dengan OGP



Pada 23 Mei 2025, telah berlangsung pertemuan antara pimpinan BKSAP DPR RI dengan perwakilan Open Government Partnership (OGP), yakni Shreya Basu (*Chief of Country and Local Programs*) dan Swati Mehta (*Regional Lead Asia Pacific*). Dari pihak DPR RI hadir Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS) dan Muhammad M. Hussein Fadhlullah (F-Gerindra) selaku Ketua Panja OGP dan Wakil Ketua BKSAP. Dalam pertemuan tersebut, Mardani menyampaikan apresiasi atas kehadiran OGP di Indonesia dan menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen lama terhadap agenda keterbukaan parlemen. Komitmen ini sempat mengalami kevakuman namun kini dihidupkan kembali, salah satunya melalui pembentukan Panitia Kerja Open Government–Parliament oleh BKSAP sebagai wujud keseriusan dalam mengarusutamakan transparansi dan akuntabilitas parlemen. DPR RI juga telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan agenda ini kepada publik, termasuk menjalin komunikasi dengan masyarakat sipil dan eksekutif. BKSAP juga berharap dapat memperkuat kerja sama strategis dengan OGP di masa mendatang.



Menanggapi hal tersebut, Shreya Basu mengapresiasi langkah DPR RI dan menyambut baik semangat pembaruan komitmen parlemen terhadap keterbukaan. Ia menegaskan bahwa OGP siap mendukung dan bekerja sama dalam agenda keterbukaan parlemen Indonesia, serta berharap agar komitmen ini dapat terus dijaga terlepas dari masa kerja Panja. Dalam pertemuan ini, Shreya juga menyampaikan rencana kunjungan CEO OGP, Aidan Eyakuze, ke Indonesia pada bulan Juli atau Agustus 2025, dan mengundang pimpinan BKSAP untuk menerima kunjungan tersebut. Selain itu, ia juga berharap DPR RI dapat berpartisipasi dalam OGP Global Summit yang akan diselenggarakan pada Oktober 2025 di Spanyol. Dalam tanggapannya, Husein Fadlulloh menekankan pentingnya dukungan penuh dari pimpinan parlemen untuk menjamin keberlanjutan agenda ini, agar tidak perlu memulai kembali dari titik nol setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

Integrasi Komitmen DPR RI ke dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia

DPR RI sebelumnya telah memiliki dua Rencana Aksi Nasional (NAP-National Action Plan) Open Parliament Indonesia (OPI), yakni untuk periode 2018–2020 dan 2020–2022. Namun, kedua rencana tersebut tidak berlanjut secara sistematis karena terjadinya pergeseran fokus kepemimpinan di lingkungan DPR RI pada waktu itu, serta belum adanya dukungan kelembagaan yang memadai. Tahun 2025 menjadi titik balik penting dengan dimulainya kembali komitmen DPR RI terhadap agenda keterbukaan melalui Panitia Kerja *Open Government–Parliament* (Panja OG-P) yang dibentuk oleh BKSAP DPR RI. Sebagai bagian dari penguatan komitmen ini, BKSAP mengusulkan agar keterbukaan parlemen tidak lagi berjalan terpisah, melainkan secara aktif

diarusutamakan ke dalam Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) 2026–2028 yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk tujuan tersebut, telah dilakukan rangkaian diskusi dan koordinasi teknis, baik secara internal dengan unit-unit kerja terkait di Sekretariat Jenderal DPR RI, maupun secara eksternal dengan Bappenas selaku *focal point* OGI. Selain itu, Panja OG-P juga menjaring masukan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam proses diskusi, termasuk di antaranya IPC hingga Perludem. Panja juga berkolaborasi bersama mitra internasional seperti WFD untuk mendapatkan wacana dan pengayaan pengalaman dari praktik baik parlemen lain mengenai mekanisme transparansi, keterbukaan dan partisipasi. Dari hasil proses-proses tersebut, disepakati dua komitmen prioritas untuk diintegrasikan ke dalam RAN OGI, yaitu:

1. Partisipasi Publik Bermakna dalam Proses Legislasi
2. Perluasan Akses dan Transformasi Digital TV Parlemen (TVR DPR RI)



Komitmen pertama Partisipasi Publik Bermakna dalam Proses Legislasi bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR RI. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap hak masyarakat tidak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan penjelasan atas keputusan legislatif, sesuai dengan prinsip *right to be heard*, *right to be considered*, and *right to be explained* sebagaimana digariskan Mahkamah Konstitusi.

Langkah awal dari komitmen ini adalah menyusun dan mengesahkan sebuah Pedoman Partisipasi Publik Bermakna yang akan menjadi rujukan kerja, bentuk, mekanisme, dan standar partisipasi publik, baik daring maupun luring, sejak tahap awal penyusunan Naskah Akademik (NA) hingga pembahasan RUU. Hal ini akan mencakup: (1) desain kanal partisipasi yang inklusif; (2) penyediaan waktu yang cukup untuk konsultasi publik; (3) alokasi sumber daya (SDM, keuangan, dan teknologi); serta (4) mekanisme umpan

balik untuk menjelaskan apakah dan bagaimana masukan masyarakat digunakan dalam penyusunan kebijakan.



Target utama dari komitmen ini adalah menciptakan proses legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sebagai indikator, diharapkan akan terbentuk: (a) satu dokumen pedoman nasional partisipasi publik legislatif, (b) platform partisipasi daring yang aktif digunakan, dan (c) laporan periodik mengenai kualitas partisipasi serta implementasinya, termasuk oleh DPR RI dan mitra masyarakat sipil.



Komitmen kedua, Perluasan Akses dan Transformasi Digital TV Parlemen (TVR DPR RI), bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas parlemen melalui media penyiaran publik, khususnya TV Parlemen (TVR DPR RI). TVR selama ini menjadi kanal penting dalam menyampaikan proses kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran kepada publik. Namun jangkauannya masih terbatas, baik secara teknis (cakupan siaran) maupun kualitas (format tayangan, interaktivitas, dan daya tarik penyajian).

Dalam komitmen ini, DPR RI, melalui Biro Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat, akan mendorong transformasi digital TVR secara menyeluruh. Paket kegiatannya mencakup: (1) revitalisasi platform digital (peningkatan web siar TV Parlemen, UX/UI, dan fitur siaran ulang); (2) peningkatan produksi konten legislasi yang inklusif dan mudah dipahami publik (infografis, ringkasan RUU, testimoni masyarakat, dll); (3) kerja sama penyiaran ulang dengan televisi nasional atau kanal YouTube institusional melalui skema simulcast atau re-broadcasting; dan (4) penyelenggaraan "*TV Parlemen Days*" secara berkala di daerah untuk memperkenalkan siaran legislatif ke masyarakat luas.

Dalam kerangka RAN OGI, komitmen ini akan mendorong prinsip keterbukaan parlemen melalui akses langsung dan luas terhadap informasi kegiatan DPR RI. Targetnya termasuk meningkatnya jumlah pengguna aktif platform TVR digital, bertambahnya daerah yang dapat mengakses siaran secara langsung, dan meningkatnya jumlah kerja sama penyiaran ulang dengan mitra media nasional.

Dua komitmen ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam proses pengarusutamaan prinsip keterbukaan parlemen ke dalam arsitektur open government nasional. Melalui langkah ini, DPR RI menunjukkan upaya konkret untuk membangun model kolaborasi lintas institusi, termasuk dengan kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, model implementasi ini juga diharapkan dapat ditiru dan diadaptasi oleh parlemen daerah (DPRD) guna memperkuat budaya transparansi dan partisipasi publik di tingkat lokal.

Sinergi dengan OGP Lokal: Provinsi NTB



Sebagai tindak lanjut urgensi keterlibatan Panja OG-P dengan OGP Lokal, Ketua Panja, Muhammad Husein Fadlulloh, memimpin kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (9/7/2025). Hussein didampingi anggota Panja yaitu Himmatul Aliyah, Robert Joppy Kardinal, dan Aboe Bakar Al-Habsyi (F-PKS).

Kunjungan kerja tersebut didasari karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari lima perwakilan Indonesia dalam program Open Government Partnership (OGP) Lokal Global sejak tahun 2020. Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menonjol berkat komitmen yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif. Dalam perkembangannya, pada OGP Global Summit 2021, NTB meraih Juara 2 *OGP Spotlight Award* untuk kawasan Asia Pasifik karena pengembangan aplikasi NTB Care sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Panja OG-P kemudian berdialog dengan Gubernur NTB dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) NTB. Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur NTB, sangat menyambut baik kunjungan Panja OG-P. Lebih lanjut disampaikan bahwa NTB berkomitmen untuk melanjutkan OGP pada satu periode ke depan. Menurutnya, keterlibatan NTB dalam OGP sangat bermanfaat antara lain karena terdapat banyak peluang untuk mendapatkan bantuan pendanaan pembangunan global, memperluas jejaring internasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ditambahkan Iqbal, OGP dapat dipergunakan sebagai forum sharing best practices dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan kolaboratif.



Gubernur kemudian menegaskan program prioritas OGP NTB yaitu: (1) pengentasan kemiskinan di bawah 10 persen; (2) ketahanan pangan dengan memfokuskan kepada sektor pertanian, agroindustri, dan maritim; (3) mempromosikan NTB sebagai tujuan wisata berkelas dunia.

Dijelaskan Iqbal bahwa NGO/CSO di NTB telah memiliki kesamaan pandangan terkait tiga prioritas Pemprov NTB tersebut. Dalam hal tersebut, Iqbal mengajak NGO/CSO untuk memberikan pemetaan masalah.

Iqbal juga menyampaikan bahwa NTB dalam waktu dekat akan meluncurkan program Desa Berdaya selama dua tahun ke depan sebagai salah satu program untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di 106 desa.

Sebagai penutup di sesi pembuka, Iqbal meminta Panja OGP DPR mengawal berbagai program dan inisiatif yang diluncurkan Pemprov NTB.

Sementara itu, Ketua Panja OG-P menyampaikan delapan hal strategis dalam kerangka kunjungan ke NTB yaitu: (1) urgensi OGP sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif; (2) menjelaskan BKSAP sebagai institusi yang membangun komunikasi dengan parlemen-parlemen dari seluruh dunia; (3) menekankan bahwa OGP merupakan agenda global yang telah menjadi perhatian besar BKSAP; (4) menegaskan bahwa DPR telah memiliki Open Parliament Indonesia (OPI) yang dideklarasikan sejak 29 Agustus 2018 sebagai wujud nyata komitmen DPR dalam menerapkan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas; (5) mengungkapkan komitmen DPR terhadap OGP sebagai upaya mendekatkan DPR dengan publik; (6) menegaskan bahwa DPR BKSAP pernah memiliki National Action Plan (NAP) OPI periode 2018-2020 dan 2020-2022; (7) menyampaikan bahwa DPR tengah menyusun Usulan Awal Komitmen Keterbukaan Parlemen yang akan

menjadi bagian dari RAN OGI 2026-2028 yang tengah disusun oleh Bappenas; (8) menyampaikan komitmen BKSAP untuk mendorong pemerintah daerah untuk bergabung dengan OGP Local, melakukan monitoring dan evaluasi keberlanjutan OGP Local, dan mengadvokasi pembentukan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) termasuk di tingkat DPRD.

Wakil Ketua BKSAP juga menjelaskan kunjungannya ke NTB adalah untuk berbagi pandangan dan pengalaman terbaik dalam perumusan rencana aksi terutama dalam kerangka perumusan RAN OGI. Selain itu, Hussein ingin agar Panja OG-P dapat mengkaji potensi, peluang kolaborasi, dan upaya sinergi dan integrasi RAN OGI dan RAD NTB.

Kunjungan Panja ke NTB ini diharapkan dapat menggali dan memperkuat advokasi peran-peran dan ruang kebijakan di level parlemen yang dapat menjadi prioritas penguatan rezim keterbukaan dan pendukung area kebijakan OGP dalam kerangka dukungan untuk RAD NTB.

Ia kemudian mengharapkan Panja dapat mendalami agenda-agenda keterbukaan pemerintah baik pusat maupun daerah terutama di NTB dan dapat memperkuat skema kemitraan DPR dengan masyarakat sipil di daerah NTB dalam kerangka agenda OG.



Pada sesi diskusi, sejumlah OPD NTB menyampaikan sejumlah penjelasan sangat penting, antara lain: (1) urgensi OGP untuk memperkuat pemerintahan digital dan kebijakan berbasis data; (2) sebagai bentuk konkret komitmen kuat NTB terhadap OGP, tercatat NTB sebagai provinsi terbaik kedua setelah DIY dalam hal transparansi keuangan; (3) kemitraan dengan OGP telah memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat sejak perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi dengan

saat ini tercatat 80 persen dari 1.116 desa telah terdigitalisasi, namun baru 50 persen yang aktif. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dan inovasi, seperti aplikasi Kominfo dan sistem open source, NTB terus memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan yang efisien dan partisipatif; (4) untuk meningkatkan level partisipasi masyarakat, NTB menerapkan pemberian diskon pajak dan insentif bagi wajib pajak; (5) saat ini, NTB juga tengah meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (6) melalui OGP, NTB terus mendorong pelayanan terbaik bagi publik seperti Posyandu, Dasawisma, PKK, dan Dekranasda dengan melibatkan kader, Kemenkes, serta masyarakat; (7) urgensi pengelolaan aplikasi digital desa di NTB perlu didukung SDM memadai agar lebih optimal.

Pada sisi lain, anggota Panja menyampaikan sejumlah pendalaman terkait implementasi OGP di NTB. Anggota Panja mengajukan sejumlah pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana aplikasi digital dapat melindungi pekerja migran NTB dari risiko kematian di luar negeri?
2. Aplikasi apa yang efektif mencegah PMI NTB pulang meninggal dengan sistem informasi terintegrasi?
3. Bagaimana teknologi aplikasi membantu calon PMI NTB mendapat informasi keselamatan kerja luar negeri?
4. Bagaimana sistem digital dapat menjadi platform global untuk menonjolkan prestasi dan keunggulan NTB kepada dunia internasional?
5. Bagaimana mengatasi keterbatasan SDM dalam implementasi sistem informasi digital untuk pelayanan publik NTB?
6. Regulasi keamanan apa yang diperlukan melindungi pekerja migran NTB melalui sistem informasi digital terintegrasi?
7. Bagaimana BKSAP efektif mempromosikan *Open Government Partnership* untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan NTB?

Merespon pendalaman dari Anggota Panja, OPD-OPD memberikan sejumlah penjelasan yaitu, *pertama*, Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) telah melatih 300 ASN untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan. Bagi PMI, telah tersedia layanan gratis ke Malaysia untuk mencegah penipuan. Sementara pelatihan berbasis negara tujuan (seperti Jepang) telah menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan pencegahan PMI ilegal yang berbiaya repatriasi tinggi.

Kedua, transformasi ekonomi inklusif telah bergeser dari dominasi sektor agraris ke pengembangan potensi kelautan. Melalui pembangunan 7 pelabuhan perikanan dalam RPJMD, NTB mendorong hilirisasi sektor kelautan. Saat ini mitra baru NTB masih sebatas konsultasi dan perencanaan konservasi, namun NTB mengajak sejumlah mitra terkait untuk lebih berperan aktif dalam pemanfaatan wilayah konversi guna memperkuat perekonomian daerah berbasis kelautan.

Ketiga, NTB berkomitmen meningkatkan kualitas pariwisata melalui integrasi sektor, sertifikasi, digitalisasi, dan kolaborasi. Langkah ini mendukung implementasi rencana Gubernur untuk menciptakan destinasi wisata berkelas dunia yang berkelanjutan dan kompetitif di kancah global.

Lebih lanjut, Panja OGP menyampaikan sejumlah catatan penting antara lain agar Pemprov NTB untuk menguatkan kembali OGP sebagai bagian OGP local. Hal tersebut karena OGP dapat memperkuat Indonesia menjadi anggota OECD.

Panja juga meminta Pemprov NTB menjadikan OGP local sebagai jalan bagi Provinsi NTB menjadi destinasi utama pariwisata global. Termasuk memperkuat Sirkuit GP Mandalika sebagai produk unggulan dalam forum internasional.

Pada sisi lain, Panja mendukung Pemerintah RI & Pemprov NTB menjadikan Sirkuit GP Mandalika sebagai pemantik pariwisata, meski profit bukan berasal dari kegiatan utamanya dan justru berasal dari pelaku usaha dan kunjungan wisatawan.

Panja juga mengharapkan Pemprov NTB memperkuat digitalisasi, sertifikasi, dan penguatan sektor usaha demi keberlanjutan ekonomi pariwisata. Demikian juga Panja menegaskan urgensi dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan SDM digitalisasi, pemanfaatan sirkuit Mandalika, dan perlindungan PMI asal NTB yang terjerat scamming.



Kunjungan Kerja ke Ibukota Nusantara



Kunjungan kerja Panitia Kerja Open Government–Parliament (Panja OG-P) BKSAP DPR RI ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berlangsung pada 15–18 Juli 2025 di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Panja OG-P yang melakukan kunjungan kerja terdiri dari Muhammad Husein Fadlulloh (Wakil Ketua BKSAP DPR RI/Ketua Panja/ F-Gerindra), Eva Monalisa (F-PKB), Verrell Bramasta (F-PAN), dan M Fathi (F-Demokrat). Pertemuan utama dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kantor Otorita IKN (OIKN) dengan pimpinan otorita, yang dipimpin oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Panja untuk mendalami penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembangunan kota cerdas Nusantara, mengingat IKN ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang harus menjadi contoh tata kelola modern.



Dalam pembukaannya, Kepala OIKN menyampaikan perkembangan terbaru pembangunan IKN melalui penayangan video dan paparan teknis. Ia menegaskan bahwa pembangunan sudah memasuki fase kedua dengan rencana lelang kompleks legislatif

dan yudikatif yang akan dimulai pada akhir Juli 2025, dengan target penyelesaian pada 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) saat ini sudah dihuni ratusan karyawan dan pegawai rumah sakit, serta akan segera diikuti oleh kementerian prioritas yang tengah diidentifikasi bersama Kementerian PANRB.

OIKN juga menjelaskan sejumlah aspek tata kelola yang tengah berjalan. Pertama, pembahasan dengan Komisi II DPR terkait regulasi tipe rumah di IKN dan konsultasi dengan Kemendagri mengenai deliniasi wilayah. Kedua, kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus masyarakat secara menyeluruh, termasuk di wilayah KIPP. Ketiga, diskusi dengan kementerian terkait perpanjangan izin tambang di sekitar IKN yang menjadi perhatian Deputi Lingkungan Hidup OIKN. Dari sisi investasi, OIKN melaporkan telah berhasil menghimpun sekitar Rp123 triliun melalui skema kemitraan pemerintah–swasta.

Sejalan dengan prinsip Open Government Partnership (OGP), OIKN menyiapkan cetak biru *smart city* yang menekankan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Konsep smart governance di IKN ditujukan untuk memperkuat layanan publik digital, tata kelola berbasis data, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Selama dialog, OIKN mencontohkan partisipasi masyarakat dalam penataan Kecamatan Sepaku, yang dilakukan melalui empat kali pertemuan hingga menghasilkan desain final partisipatif. OIKN juga menjelaskan pengembangan *command center*, sistem monitoring infrastruktur, serta penerapan konsep *smart building*. Selain itu, mereka memperkenalkan aplikasi IKNOW sebagai super aplikasi layanan publik digital yang mencakup kesehatan, jadwal kunjungan, dan kanal pengaduan masyarakat.



Panja OG-P menekankan bahwa OGP merupakan gerakan global yang didirikan Indonesia bersama enam negara lain pada 2011 dan kini mencakup 75 negara serta 150 yurisdiksi daerah. Dalam konteks Indonesia, DPR RI telah memperkuat keterbukaan parlemen dengan mendeklarasikan Open Parliament Indonesia (OPI) pada 2018 dan membentuk Panja OG-P pada 2025. Oleh karena itu, kunjungan ke IKN ini diharapkan dapat memberi gambaran konkret tentang bagaimana nilai-nilai OGP diintegrasikan dalam pembangunan kota masa depan. Panja juga mencatat pentingnya komunikasi lintas-lembaga agar indikator keterbukaan tidak sekadar retorika, tetapi terintegrasi dalam desain kebijakan.

Meski demikian, Panja mencatat sejumlah keterbatasan. Indikator penerapan prinsip OGP dalam tata kelola publik belum dirumuskan secara jelas oleh OIKN. SOP pengelolaan sampah sudah berjalan, tetapi SOP terkait pembuangan minyak rumah tangga masih belum tersedia. Dalam bidang pendidikan, infrastruktur sekolah telah dibangun, namun pengelolaannya belum diputuskan karena perbedaan format sekolah pemerintah. OIKN bahkan secara khusus meminta agar Panja dapat menjembatani komunikasi langsung ke Presiden mengenai status sekolah, karena hal ini berimplikasi pada keberlanjutan layanan dasar masyarakat. Panja juga menekankan perlunya jaminan inklusivitas dalam layanan publik, termasuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.



Pada akhir pertemuan, OIKN menyatakan minat untuk bergabung dalam OGP Local, mengingat kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus berada di bawah OIKN. Mereka berharap IKN dapat menjadi contoh praktik tata kelola terbuka yang dapat direplikasi di daerah lain. Panja menyambut baik niat tersebut dan menegaskan pentingnya komunikasi lebih lanjut dengan Bappenas sebagai *focal point* OGP Indonesia.



Temuan Panja

Peningkatan inovasi digital daerah perlu dibarengi dengan inklusivitas, aksesibilitas, inter-operabilitas program terkait

Beberapa daerah sudah memiliki program-program unggulan berbasis digital sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Provinsi Jawa Barat misalnya memiliki program *Jabar Digital Academy* (JDA) dan *SapaWarga* yang merupakan upaya pemberian pelayanan publik terpadu secara digital dan terbuka. Otorita OIKN selain memiliki Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, juga sudah mengembangkan command center, sistem monitoring infrastruktur, serta smart building. OIKN juga telah meluncurkan Aplikasi *IKNOW* sebagai super-app layanan publik digital dan platform Investara yang digunakan untuk membuka informasi investasi.

Kebijakan dan program-program semacam ini merupakan pembaruan yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan dan good governance di daerah. Meskipun demikian, Panja menyoroti perlunya memastikan aplikasi tersebut inklusif, mudah digunakan, dan terhubung dengan sistem interoperabilitas nasional. Panja juga menyoroti keterbatasan aplikasi dalam hal bahasa lokal, penetrasi internet di desa-desa, serta publikasi program yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh lagi, Panja mencatat belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana prinsip OGP sudah diterapkan melalui cetak biru maupun pelaksanaan program-program tersebut.

Belum ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan prinsip-prinsip OGP dalam tata kelola dan program pemerintah secara menyeluruh

Beberapa daerah, termasuk Jabar, sudah memiliki peraturan eksisting seperti Perda 11/2011 yang sejalan dengan nilai-nilai OGP. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi spesifik (misalnya Perda baru tentang OGP) yang dapat memperkuat keberlanjutan program. Hal ini membuat keberlangsungan OGP masih bergantung pada komitmen politik kepala daerah dan perangkat daerah, sehingga berpotensi tidak berkelanjutan jika terjadi perubahan kepemimpinan. Hal serupa juga terjadi di level nasional baik di pemerintah maupun DPR.

Kendala dan keterlambatan regulasi membuat beberapa pelayanan dasar masyarakat tertunda

Beberapa pemerintah daerah memiliki kesulitan untuk menyusun regulasi untuk mengejar keteringgalan perkembangan kebutuhan pembangunan masyarakat. OIKN misalnya, menghadapi kendala regulasi dalam hal pengelolaan sekolah yang infrastruktur fisiknya sudah ada tetapi belum jelas model penyelenggaraannya. Kekurangan ini menandakan adanya keterlambatan regulasi yang bisa menghambat

layanan dasar. Regulasi dalam bentuk peraturan daerah juga kemudian harus diturunkan menjadi peraturan teknis agar tidak ada kesenjangan antara komitmen keterbukaan dengan implementasi teknis di lapangan.

Keterbatasan sinergi legislatif-eksekutif untuk mendukung penerapan prinsip OGP karena kurangnya *awareness* pembuat kebijakan

Pemprov Jabar telah melakukan koordinasi dengan DPRD melalui mekanisme seperti RDP dan pembahasan APBD. Namun, dalam aspek penguatan prinsip-prinsip pelaksanaan OGP, pemahaman anggota DPRD masih terbatas. Keterlibatan legislatif sangat penting karena DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang bisa menopang program OGP agar lebih terinstitusionalisasi.

Keberlanjutan komitmen OGP Locals masih bergantung pada *political will*

Keberlanjutan komitmen OGP Locals masih bergantung pada *political will* pimpinan daerah. Di Jawa Barat misalnya, setelah terpilih menjadi OGP Local, Pemprov setempat belum melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk disampaikan kepada OGP. Informasi mengenai komitmen menjadi OGP Local tidak diteruskan secara utuh, sementara kepala daerah telah berganti.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang sempat menyampaikan rencana aksi keterbukaan daerah periode 2021-2023. Namun saat ini, meski masih berstatus OGP Local, Pemprov setempat belum kembali menginisiasi keberlanjutan rencana keterbukaan. Meski patut dicatat, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan keterlibatan NTB di OGP Local dan memulai proses ko-kreasi untuk penyusunan rencana aksi berikutnya.

Hal ini menunjukkan perlu adanya *political will* yang kuat untuk melanjutkan komitmen OGP Local bagi daerah-daerah yang telah berhasil menyandang status dimaksud. Selain itu Panja juga mengingatkan keberadaan instrumen regulasi yang kuat, pendanaan, dan kolaborasi multipihak menjadi sangat penting agar program tidak berhenti di tengah jalan.

Kolaborasi multipihak perlu penguatan

Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai kolaborasi multi-pihak untuk mendorong perbaikan dan peningkatan keterbukaan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya melakukan kolaborasi dengan berbagai mitra, mulai dari sektor swasta (AWS, Lintasarta), pemerintah asing, hingga forum CSR.

Sementara di DIY, mekanisme transparansi anggaran mendorong LSM menjadi mitra konstruktif. Keterlibatan LSM dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, menciptakan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Hal ini menjadi kekuatan yang bisa memperluas dampak program yang sesuai dengan prinsip-prinsip OGP. Namun, Panja juga menekankan perlunya memperluas kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan DPRD, maupun perwakilan kelompok-kelompok rentan agar proses ko-kreasi yang inklusif benar-benar terwujud.

Partisipasi masyarakat krusial sejak dalam perencanaan pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi salah satu tolak ukur penting memastikan nilai-nilai OGP tercermin dalam tata kelola pemerintah daerah. Proyek penataan Kecamatan Sepaku yang menjadi wilayah penyangga OIKN menjadi contoh praktik partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam pertemuan berulang hingga desain final disepakati bersama. Hal ini memperlihatkan model ko-kreasi yang sesuai dengan prinsip OGP. Kelebihan ini penting karena menunjukkan partisipasi tidak hanya formal, tetapi nyata dalam desain tata ruang. Panja menekankan bahwa praktik-praktik seperti ini untuk dilanjutkan pada berbagai pembuatan kebijakan yang menyangkut masyarakat di berbagai daerah lain.

Kemanfaatan saat meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah

Prinsip-prinsip keterbukaan OGP juga mendorong pemerintah daerah semakin terbuka dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang menjadi perhatian Panja ketika mengunjungi OIKN adalah bagaimana OIKN berhasil menghimpun investasi sekitar Rp123 triliun melalui skema PPP. Keberhasilan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap proyek strategis nasional. Meskipun demikian, Panja menilai penting adanya keterbukaan lebih lanjut terkait distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan dana agar publik turut memantau secara transparan.

Minat daerah untuk bergabung dengan OGP Locals

Berdasarkan kunjungan Panja, OIKN menyatakan minat untuk bergabung dengan OGP Local, mengikuti delapan daerah Indonesia yang sudah lebih dahulu bergabung. Hal ini menjadi peluang besar agar IKN menjadi *showcase* praktik pemerintahan terbuka. Meskipun demikian, Panja menekankan bahwa keterlibatan ini harus diikuti kesiapan regulasi, kelembagaan, dan strategi komunikasi publik agar tidak sebatas simbolis. Adanya keinginan untuk bergabung dan memperkuat *learning experience* tersebut perlu ditindaklanjuti dengan advokasi berlanjut untuk keterlibatan daerah-daerah baru sebagai OGP Local.

DIPLOMASI PARLEMEN: KETERHUBUNGAN ISU DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

OGP Asia and the Pacific Regional Meeting, Manila, Filipina 5-7 Februari 2025.

BKSAP menghadiri agenda OGP Asia and the Pacific Regional Meeting untuk menyampaikan pandangan DPR terkait open government serta menjalin kerja sama lebih erat dan menguatkan jaringan DPR dengan insan OGP. Melalui agenda tersebut, BKSAP kemudian mengawali komitmen untuk kembali memperkuat OPI melalui pembentukan Panja OG-P.

BKSAP, dengan mempertimbangkan peran DPR RI dalam diplomasi parlemen, mencoba untuk mendorong penguatan pelaksanaan keterbukaan di level internasional. Panja dibentuk dengan harapan dapat meningkatkan kembali peran dan implementasi keterbukaan parlemen. Pertemuan *OGP Asia and the Pacific Regional Meeting* mempertemukan lebih dari 800 peserta, termasuk para pemimpin pemerintahan, aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), dan pakar kebijakan dari lebih dari 40 negara. BKSAP menghadiri agenda *OGP Asia and the Pacific Regional Meeting* untuk menyampaikan pandangan DPR terkait open government serta menjalin kerja sama lebih erat dan menguatkan jaringan DPR dengan insan OGP dalam kerangka mendukung terciptanya open parliament di DPR.

The 19th Session of the PUIC Conference, Jakarta, Indonesia, 12-15 Mei 2025.

Sebagai bagian dari komitmen diplomasi parlemen dan penguatan tata kelola pemerintahan terbuka, Panitia Kerja *Open Government–Parliament* (Panja OGP) DPR RI turut mendukung penyelenggaraan Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Konferensi ini mengusung tema “*PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience*”, sejalan dengan semangat Panja OGP dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi ketahanan demokrasi.

Panja OGP DPR RI memandang konferensi ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran parlemen negara-negara OKI dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan penurunan kepercayaan publik. Melalui forum ini, Panja OGP akan mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) dalam kerja sama Selatan-Selatan, serta mendukung isu-isu krusial seperti kemerdekaan Palestina dan perlindungan hak-hak minoritas Muslim. Dengan menjadi tuan rumah, DPR RI menegaskan peran aktifnya dalam membangun institusi yang kuat dan tata kelola yang baik, sejalan dengan agenda reformasi global dan aspirasi masyarakat Islam dunia.

SEAPAC Annual General Meeting (AGM) & Bulaksumur Roundtable Forum (BRF), Yogyakarta, Indonesia, 20-21 Agustus 2025.

AGM dan Roundtable Forum/Discussion merupakan forum strategis untuk menetapkan arah kebijakan SEAPAC. Dalam agenda tersebut, Anggota Panja yang juga anggota SEAPAC dari BKSAP menyuarakan pentingnya demokrasi lingkungan sebagai bagian dari agenda iklim yang berkeadilan. Delegasi berkontribusi dalam menyusun hasil keluaran SEAPAC yakni Call to Actions, dengan salah satu seruan terkait penyempurnaan legislasi terkait demokrasi lingkungan hidup yakni partisipasi publik bermakna, reformasi dalam akses informasi, hingga perlindungan yang lebih baik bagi aktivis lingkungan.

Melalui BRF, BKSAP menekankan bahwa percepatan aksi iklim harus berlandaskan pada tiga pilar demokrasi lingkungan: akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan—sejalan dengan prinsip OGP. Indonesia, melalui Environmental Democracy Observatory (EDO), telah mengukur dan memperkuat ketiga pilar tersebut sebagai fondasi tata kelola iklim yang transparan dan partisipatif.

III – PENUTUP DAN REKOMENDASI

Setelah mendengar, menganalisis, berjumpa dengan pemangku otoritas daerah, hingga mengadvokasi isu OGP Local, Panja OG-P merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan DPR RI dalam upaya memperkuat mekanisme pengarusutamaan nilai dan prinsip OGP di Indonesia.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Penguatan instrumen hukum dan kelembagaan OGP.

Sebagai salah satu negara pendiri *Open Government Partnership* (OGP), Indonesia telah menunjukkan komitmen awal yang kuat terhadap prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Namun, Panja OGP DPR RI mencatat bahwa tantangan institusional masih signifikan, terutama dalam hal tata kelola, keberlanjutan, dan penguatan instrumen hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil. Saat ini, kerangka hukum OGP di Indonesia masih bertumpu pada Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014, yang bersifat penetapan dan belum cukup menjamin keberlanjutan serta efektivitas pelaksanaan komitmen OGP.

Oleh karena itu, Panja OGP merekomendasikan penguatan instrumen hukum yang lebih komprehensif dan mengatur aspek kelembagaan, tata kelola, sumber daya, serta mekanisme koordinasi lintas sektor hingga pusat-daerah. Untuk mewujudkan hal ini, Panja OGP perlu menginisiasi pertemuan kelembagaan dengan mitra pemerintah guna mengajukan usulan resmi terkait penguatan regulasi OGP. Langkah ini penting agar prinsip keterbukaan tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penyelarasan dan penguatan rencana aksi keterbukaan.

Penerapan prinsip keterbukaan pemerintah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan kebijakan yang terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, rekomendasi Panja OGP untuk melakukan penyelarasan antara Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia dengan dokumen perencanaan utama seperti RPJMN, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) menjadi sangat penting.

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa komitmen keterbukaan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar diarusutamakan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Tanpa integrasi ini, pelaksanaan komitmen OGP berisiko tidak mendapatkan alokasi sumber daya yang

memadai, baik dari sisi anggaran, SDM, infrastruktur, maupun dukungan teknologi informasi.

Lebih jauh, penyelarasan ini juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, sehingga pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dapat dilakukan secara konsisten dan terukur. Dengan demikian, keterbukaan pemerintah tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, integrasi dalam dokumen perencanaan strategis akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional seperti OGP Global Summit. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen secara politis, tetapi juga secara teknokratis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola digital berbasis prinsip OGP.

Panja OGP BKSAP DPR RI merekomendasikan lima kebijakan strategis untuk memperkuat tata kelola digital yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip Open Government:

- Menyediakan data publik dalam format terbuka, terstruktur, dan mudah diakses untuk mendukung transparansi dan inovasi berbasis data.
- Mengembangkan dan mengintegrasikan kanal *e-consultation*, *e-petition*, dan forum publik digital untuk memperluas ruang partisipasi warga dalam proses legislasi dan kebijakan.
- Memperkuat mekanisme pelaporan dan pengaduan publik berbasis teknologi yang transparan, responsif, dan terintegrasi lintas sektor.
- Memperluas akses internet dan meningkatkan literasi digital, khususnya di daerah 3T dan kelompok rentan, guna menjamin inklusivitas.
- Menyempurnakan regulasi perlindungan data pribadi dan membentuk lembaga pengawas independen untuk menjamin keamanan digital warga negara.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga inklusif dan demokratis secara substansi.

Rekomendasi ini menjawab tantangan nyata dalam implementasi prinsip OGP di era digital, termasuk keterbatasan akses data, rendahnya partisipasi publik daring, lemahnya akuntabilitas digital, serta kesenjangan akses dan perlindungan data. Dengan kebijakan yang terarah dan terintegrasi, pemerintah dapat membangun ekosistem digital yang berpihak pada kepentingan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Asistensi dan monitoring terhadap OGP Lokal.

Temuan Panja secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai partisipasi dan keterlibatan OGP Lokal baik untuk daerah yang baru meraih status keanggotaannya ataupun yang telah mendapatkannya sebelumnya. Hal ini terlihat dari semisal belum utuhnya proses pelaksanaan komitmen melalui penyampaian RAD hingga ketidakberlanjutan RAD.

Atas hal ini Panja merekomendasikan pemerintah pusat melalui OGI untuk terus menerus melakukan asistensi untuk membantu pemerintah daerah yang berstatus OGP Lokal memenuhi komitmennya dan melaksanakan secara berkelanjutan kewajiban-kewajiban ketika mengemban status OGP Lokal. Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme monitoring berkala untuk memastikan komitmen-komitmen yang telah disampaikan ke OGP dapat terlaksana secara memadai.

REKOMENDASI UNTUK DPR RI

Penguatan kelembagaan dan komitmen Parlemen Terbuka.

Panja OG-P DPR RI merekomendasikan penguatan kelembagaan pelaksanaan prinsip-prinsip OGP—transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas—di DPR sebagai bagian mekanisme pengarusutamaan nilai-nilai dimaksud. Deklarasi OPI pada 2018 menjadi tonggak awal kelembagaan yang kemudian diperkuat melalui keberadaan Tim Pengawas OPI di level Pimpinan DPR RI pada periode 2019-2024.

Sebagai salah satu pionir terbentuknya OGP dan juga salah satu parlemen pertama di Asia yang mendeklarasikan OPI pada 2018, DPR perlu melihat ini sebagai prestasi internasional dan oleh karenanya dapat menjadi rujukan dan model percontohan bagi negara lain. Ke depan DPR dapat mendorong pembentukan mekanisme memadai untuk pengarusutamaan komitmen parlemen terbuka, seiring dengan proyeksi integrasi rencana keterbukaan parlemen ke dalam rencana keterbukaan nasional.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya reformasi kelembagaan dan modernisasi parlemen, di mana prinsip OGP dapat menjadi kerangka kerja yang mendorong efisiensi, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Melalui integrasi ini, DPR RI tidak hanya memperkuat peran domestiknya sebagai lembaga representatif, tetapi juga menunjukkan komitmen global dalam mendukung tata kelola demokratis yang terbuka dan inklusif.

Untuk mendukung hal tersebut, Panja OGP juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan kompetensi berkelanjutan bagi pejabat, staf,

dan tenaga ahli di lingkungan DPR RI mengenai prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

Selain itu, Panja menggarisbawahi komitmen pimpinan DPR RI menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi ini. Dukungan aktif dari pimpinan akan memastikan bahwa agenda keterbukaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dan arah strategis kelembagaan DPR RI ke depan.

Penguatan transparansi dan akses informasi.

Panja OGP DPR RI merekomendasikan penguatan transparansi dan akses informasi sebagai elemen kunci dalam mewujudkan parlemen yang terbuka dan akuntabel. Untuk itu, DPR RI perlu mengoptimalkan platform digital yang memungkinkan publik mengakses informasi secara mudah dan *real-time*, termasuk data kinerja, anggaran, dan proses legislasi. Platform ini harus dirancang dengan prinsip inklusivitas dan kemudahan navigasi agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, penyajian data dalam format terbuka (*open data*) sangat penting agar informasi publik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, dan media untuk analisis dan pengawasan. Panja juga mendorong pelaporan berkala yang transparan mengenai implementasi program OGP, termasuk capaian, tantangan, dan tingkat partisipasi publik. Langkah-langkah ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dan memastikan bahwa prinsip keterbukaan benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja kelembagaan.

Pengarusutamaan partisipasi publik bermakna.

Dinamika sosial politik yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum untuk refleksi dan peningkatan performa kelembagaan agar dapat betul-betul menjadi lembaga representasi yang aspiratif, partisipatif, terbuka, dan akuntabel. Salah satu mekanisme yang perlu untuk diperkuat adalah mengenai prinsip partisipasi publik bermakna yang mencakup hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan aspirasinya (*right to be considered*), dan hak mendapat penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Panja merekomendasikan agar DPR mengarusutamakan dan memperkuat mekanisme tata kelola pelaksanaan partisipasi publik bermakna dalam mekanisme kerja lembaganya.

Inisiatif Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (PUU Ekkukesra) Badan Keahlian DPR RI dalam menyusun manual partisipasi masyarakat yang bermakna patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju agenda pengarusutamaan tersebut. Panja juga menggarisbawahi penguatan mekanisme transparansi informasi, partisipasi publik, hingga akuntabilitas menjadi bagian utuh dari nilai-nilai OGP yang perlu diintegrasikan.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai keterbukaan tidak berdiri sebagai inisiatif terpisah, melainkan menjadi bagian utuh dari fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan DPR. Dengan pendekatan ini, DPR RI dapat memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Diplomasi parlemen proaktif dalam agenda keterbukaan.

Panja OGP DPR RI merekomendasikan penguatan diplomasi parlemen secara proaktif sebagai bagian integral dari agenda Open Parliament. Dalam konteks global yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, diplomasi parlemen tidak hanya berfungsi sebagai representasi politik luar negeri, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai keterbukaan legislatif Indonesia di forum internasional. Melalui keterlibatan aktif dalam jaringan seperti OGP, IPU, PUIC, AIPA dan forum regional lainnya, DPR RI dapat memperkuat posisi strategisnya sebagai parlemen modern yang responsif terhadap tantangan global.

Diplomasi yang proaktif juga memungkinkan DPR RI untuk berbagi praktik baik, membangun kemitraan lintas negara, serta mendorong adopsi standar tata kelola legislatif yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan menjadikan prinsip OGP sebagai bagian dari diplomasi parlemen, DPR RI tidak hanya memperkuat legitimasi kelembagaan di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk ekosistem demokrasi global yang lebih transparan dan partisipatif.

Keberlanjutan Panja OGP ataupun Panja baru dengan mengusung nilai-nilai OGP.

Panja OGP DPR RI merekomendasikan keberlanjutan Panja OGP, atau pembentukan Panja baru dengan mandat serupa, sebagai langkah strategis untuk memastikan konsistensi dan efektivitas agenda keterbukaan parlemen. Mengingat kompleksitas isu tata kelola pemerintahan terbuka dan dinamika politik yang terus berkembang, keberadaan Panja menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan advokasi nilai-nilai OGP, seperti transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Keberlanjutan Panja OGP juga diperlukan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di forum internasional, mendorong integrasi Rencana Aksi OPI ke dalam Rencana Aksi Nasional OGI, serta memastikan keterlibatan aktif DPR RI dalam proses co-creation kebijakan bersama masyarakat sipil. Dengan tetap mengusung nilai-nilai OGP, Panja dapat menjadi motor penggerak reformasi legislatif yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik, sekaligus memperkuat posisi DPR RI sebagai parlemen modern yang terbuka dan berdaya saing global.

Demikian rekomendasi Panja OG-P BKSAP DPR RI ini disampaikan sebagai bagian hasil analisis, kajian kebijakan dan penghimpunan data yang dilakukan BKSAP DPR RI sejalan dengan tata cara pelaksanaan tugas BKSAP DPR RI yang termaktub dalam Tata Tertib DPR RI. Panja berharap semoga pihak-pihak terkait dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan.

DAFTAR NAMA PANJA
OPEN GOVERNMENT-PARLIAMENT

NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A.	P.GERINDRA	KETUA PANJA
2.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.Comm&MediaSt.	PDIP	ANGGOTA PANJA
3.	RAVINDRA AIRLANGGA, B.A., M.S.	PG	ANGGOTA PANJA
4.	Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.	PKS	ANGGOTA PANJA
5.	BRAMANTYO SUWONDO, M.IR (Kapoksi)	PD	ANGGOTA PANJA
6.	dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM	PDIP	ANGGOTA PANJA
7.	DIAH PIKATAN O PUTRI HAPRANI	PDIP	ANGGOTA PANJA
8.	RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc.	PDIP	ANGGOTA PANJA
9.	STEVANO RIZKI ADRANACUS	PDIP	ANGGOTA PANJA
10.	Dr. H. MUSA RAJEKSHAH, S.Sos., M.Hum	PG	ANGGOTA PANJA
11.	ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B	PG	ANGGOTA PANJA
12.	Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.	PG	ANGGOTA PANJA
13.	MARLYN MAISARAH (Kapoksi)	P. GERINDRA	ANGGOTA PANJA
14.	Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.	P. GERINDRA	ANGGOTA PANJA
15.	MELLY GOESLAW	P. GERINDRA	ANGGOTA PANJA
16.	RACHMAT GOBEL	P. NASDEM	ANGGOTA PANJA
17.	PRANANDA SURYA PALOH	P. NASDEM	ANGGOTA PANJA
18.	GULAM MOHAMAD SHARON	P. NASDEM	ANGGOTA PANJA
19.	ABDULLAH, S.Sy.	PKB	ANGGOTA PANJA
20.	EVA MONALISA	PKB	ANGGOTA PANJA
21.	HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.	PKS	ANGGOTA PANJA
22.	HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.	PKS	ANGGOTA PANJA
23.	SIGIT PURNOMO, S.A.P	PAN	ANGGOTA PANJA
24.	VERRELL BRAMASTA	PAN	ANGGOTA PANJA
25.	H. FATHI	PD	ANGGOTA PANJA



The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation
The House of Representatives of the Republic of Indonesia
Nusantara III Building, 2nd Floor, MPR/DPR/DPD RI Complex
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan , Jakarta
Tlp. : 021-5715841
Fax. : 021-5752132
Email : biro_ksap@dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>